

**PERANAN KOMITE MADRASAH DALAM
MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN
DI MAN 1 PALEMBANG**



SKRIPSI SARJANA S.1

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd.)**

Oleh:

**LILYS FEBRIANA
NIM: 14210119**

Program Studi Pendidikan Agama Islam

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
2018**

Hal: Persetujuan Pembimbing

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan

Keguruan UIN Raden Fatah Palembang

di-

Palembang

Assalamu'aliikum Wr. Wb

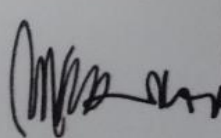
Setelah diperiksa dan diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skipi berjudul **"PERANAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI MAN 1 PALEMBANG"** yang ditulis oleh **Lilys Febriana, NIM. 14210119** telah dapat diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang.

Demikianlah terima kasih

Wassalmu'alaikum Wr. Wb

Palembang, November 2018

Pembimbing I

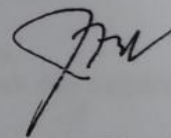


Ace
ent ujan
12
11/2018

Muhammad Isnaini, M. Pd.,

NIP: 197402012000031004

Pembimbing II



Drs. Ahmad Syarifuddin, M.Pd.I.

NIP: 196309111994031001

Skripsi Berjudul

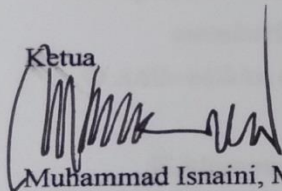
**PERANAN KOMITE MADRASAH DALAM MENINGKATKAN MUTU
PENDIDIKAN DI MAN 1
PALEMBANG**

Yang ditulis oleh saudari Lilys Febriana , NIM. 14210119
Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan
Di depan Panitia Penguji Skripsi
Pada tanggal, 29 November 2018

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd)

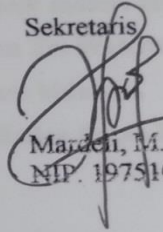
Palembang, 29 November 2018
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang
Panitia Penguji Skripsi

Ketua



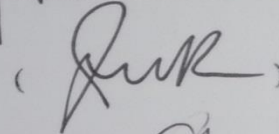
Muhammad Isnaini, M, Pd
NIP. 19740201 200003 1 004

Sekretaris

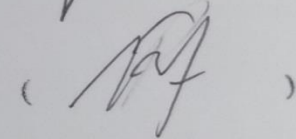


Mardani, M.A
NIP. 19751008 200003 2 001

Penguji Utama : H. Alimron, M. Ag
NIP. 19720213 200003 1 002

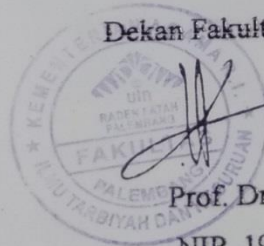


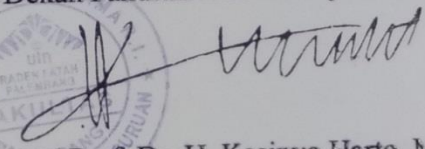
Anggota Penguji : H. Sukirman, M.Si
NIP. 19710703 200720 1 004



Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan




Prof. Dr. H. Kasinyo Harto, M.Ag.
NIP. 19710911 199703 1 004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu"

(Bobby Unser)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ☺ **Ayahanda Kawilarang dan Ibunda Sensuryati, yang tak pernah letih memberikan do'a serta dukungan baik materi ataupun motivasi.**
- ☺ **Adik-adikku tercinta Bagus Sahdewo dan Tri Wahyudi yang menjadi penyemangat dalam hidupku.**
- ☺ **Alamamater Kebanggaanku UIN Raden Fatah Palembang.**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamiin, segala puji bagi Allah SWT, atas ridho, nikmat, karunia, rahmat-nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Peranan komite madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang”**. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Pada penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak kesulitan dan hambatan. Namun, berkat kemudahan Allah SWT serta bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Maka dari itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Drs. H. Muhammad Sirozi, MA. Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberi banyak kebijakan sehingga peneliti dapat menyelesaikan proses penelitian dengan cepat.
2. Bapak Prof. Dr. H. Kasinyo Harto, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberi

banyak kebijakan sehingga peneliti dapat menyelesaikan proses penelitian dengan cepat.

3. Bapak H. Alimron, M.Ag dan Ibu Mardeli, M.A selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan banyak program yang bermanfaat sehingga peneliti banyak memiliki keterampilan dalam bidang akademik dan non akademik.
4. Bapak Muhammad Isnaini, M.Pd selaku Pembimbing I dan Bapak Drs.Ahmmad Syarifuddin, M.Pd.I. selaku Pembimbing II, yang telah banyak menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan, dorongan, semangat dan do'a dalam membantu menyelesaikan skripsi ini di tengah kesibukannya.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan.
6. Pimpinan Perpustakaan Pusat dan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang telah memberikan fasilitas buku serta jurnal untuk menambahkan teori pada skripsi ini.
7. Ibu Kepala Madrasah Aliyah Negri 1 Palembang dan guru-guru serta karyawan yang telah memberikan izin saya penelitian, dan membantu memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
8. Ayahanda tercinta Kawilarang dan Ibunda tercinta Sensuryati yang tidak pernah lupa mendoakanku, memberikan materi serta waktu untuk

mendengarkan keluh kesahku, yang telah memberiaku motivasi selama perkuliahan, kalian adalah penyemangatku dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas tercinta ini.

9. Adik-adikku Bagus Sahdewo dan Tri Wahyudi yang selalu memberikan semangat dan memeberikan doa dalam pembuatan skripsi ini.
10. Sahabat tercinta dan saudarah angkatku Ruri Septia Ningsih , Safira Rossa Cindona, dan Marlina, yang berjuang bersama, yang selalu menemaniku bimbingan, mengurus berkas, tempat mengadu, maafkan selalu menyusahkan, kalian takkan kulupakan, terimakasih sayang-sayangku.
11. Rekan dan sahabat seperjuangan Mahasiswa/I UIN Raden Fatah jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2014 terutama PAI 4 2014 dan PAI 5 FIQH 2014 yang banyak memberikan dukungan dan masukan selama menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran-saran dan kritik yang membangun untuk kemajuan penelitian kedepannya agar lebih baik lagi. Atas segala kekurangan dan kekhilafan peneliti minta maaf dan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Palembang, November 2018

Lilys Febriana

NIM. 14210119

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Kerangka Teori	13
F. Metodologi Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	24
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Peran dan fungsi komite	26
1. Pengertian peranan	26

2. Peranan Komite Madrasah	27
3. Fungsi Komite Madrasah	31
4. Tujuan Pembentukan Komite Madrasah	35
B. Mutu Pendidikan	38
1. Pengertian mutu pendidikan	38
2. Dasar dan tujuan pendidikan pada umumnya	41

BAB III PROFIL WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah singkat MAN 1 Palembang.....	46
B. Identitas MAN 1 Palembang	47
C. Visi, Misi, dan Tujuan MAN 1 Palembang	48
D. Periodesasi Kepemimpinan MAN 1 Palembang	51
E. Sarana dan prasarana di MAN 1 Palembang	52
F. Kondisi guru di MAN 1 Palembang.....	54
G. Kondisi staf TU di MAN 1 Palembang	57
H. Data siswa di MAN 1 Palembang.....	58
I. Prestasi di MAN 1 Palembang.....	59
J. Kegiatan ekstrakurikuler di MAN 1 Palembang	62
K. Pembagian tugas dan tanggung jawab organisasi sekolah di MAN 1 Palembang	63
L. Struktur organisasi di MAN 1 Palembang	69

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi hasil penelitian di MAN 1 Palembang.	70
B. Peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang.....	75
C. Faktor pendukung dan penghambat peran komite sekolah di MAN 1 Palembang	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 94
B. Saran 96

DAFTAR PUSTAKA 97

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Keadaan Sarana dan Prasarana	52
Tabel 3.2	Kondisi Guru	54
Tabel 3.3	Kondisi Staf TU	57
Tabel 3.4	Data Jumlah Siswa	58
Tabel 3.5	Prestasi Akademis	59
Tabel 3.6	Daftar Pemenang Lomba.....	60
Tabel 4.7	Rincian Kegiatan Penelitian.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Wawancara Dengan Bapak Ahmad Alamsyah.....	72
Gambar 4.2 Wawancara Dengan Ibu Nurbani.....	73
Gambar 4.3 Wawancara Dengan Bapak Syafi'i.....	73
Gambar 4.4 Ruang Belajar.....	74
Gambar 4.5 Auditorium MAN 1 Palembang.....	75
Gambar 4.6 Lapangan MAN 1 Palembang.....	75

ABSTRAK

Peranan komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang. Adapun rumusan masalah dalam skrikpsi ini adalah. Bagaimana peranan komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang dan apakah faktor pendukung dan penghambat peran komite madrasah di MAN 1 Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran komite di MAN 1 Palembang dan apa solusi yang diberikan komite untuk meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam perjalanan mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisisnya, menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupa data-data yang tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati sehingga dalam hal ini penulis berupaya mengadakan penelitian yang bersifat menggambarkan secara menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Selain itu keabsahan datanya dichek menggunakan teknik triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan member check.

Hasil penelitian ini menjukkan bahwa, peranan komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang sangatlah baik, itu dapat dilihat dari segi peningkatan sarana prasaranan di madrasah. Komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang tak luput dari beberapa perannya tersebut, yang pertama pertimbangan (*advisory agency*), yang kedua sebagai pendukung (*supporting agency*), yang ketiga sebagai pengotrol (*controlling agency*), dan yang keempat sebagai mediator (*executive*). Dalam menjalankan perannya tentu ada faktor pendukung dan penghambat komite madrasah, salah satu faktor penghambatnya adalah cara membagi waktu yang tepat untuk melaksanakan pertemuan rapat antara anggota komite dan pihak sekolah.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komite madrasah sangatlah berpengaruh dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang karena komite madrasah memiliki beberapa peranan yang harus dijalankan untuk sekolah itu. Memberikan pertimbangan (*advisory agency*), dalam setiap perencanaan dan program yang disusun oleh madrasah, komite madrasah. Mendukung (*supporting agency*) penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Melakukan Kontrol (*controlling agency*) terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, dan Menjadi Mediator atau penghubung antara aspirasi orang tua masyarakat terhadap pihak sekolah dan turut serta memasyarakatkan kebijakan madrasah kepada pihak-pihak yang terkait dan berwenang di tingkat daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah suatu proses pelatihan dan pengajaran, terutama di peruntukkan kepada anak-anak dan remaja, baik di sekolah-sekolah maupun di kampus-kampus, dengan tujuan memberikan pengetahuan dan mengembangkan keterampilan-keterampilan. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*, pendidikan diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.¹

Pendidikan juga adalah proses pemartabatan manusia menuju puncak optimasi potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dimilikinya. Pendidikan adalah proses membimbing, melatih, dan memandu manusia terhindar atau keluar dari kebodohan dan pembodohan. Pendidikan adalah metamorfosis perilaku menuju kedewasaan sejati. Pendidikan juga dapat didefinisikan sebagai proses elevasi yang dilakukan secara nondiskriminasi, dinamis, dan intensif.²

Menurut John Dewey, pendidikan adalah sebuah kebutuhan hidup dan fungsi sosial, yang bertumpuk pada masing-masing individu juga golongan/masyarakat, dengan kemungkinan mengalami kemajuan yang bisa

¹ U.H. Saidah, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2016), hlm. 1

² Sudarwan Danim, *Pengantar Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta,2010), hlm. 2

diukur dengan kriteria-kriteria tertentu, secara demokratis bisa dinilai dari kualitas masyarakat yang ada.³

Menurut Muhammad Athiyah Al-Abrasyi memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam (Al-Tarbiyah Al-Islamiyah) mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan berbahagia, mencitai tanah air, tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya, teratur pikirannya, halus perasaanya, mahir dalam pekerjaanya, manis tuturkatanya baik dengan lisan dan tulisan⁴

Dengan memperhatikan beberapa definisi diatas, maka berarti pendidikan Islam adalah suatu proses edukatif yang mengarah kepada pembentukan akhlak atau kepribadian. Pendidikan agama Islam di Indonesia mendapatkan tempat yang layak serta perhatian yang serius dari masyarakat dan pemerintah mulai sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Dan pendidikan agama merupakan mata pelajaran yang paling penting atau pokok di sekolah. Ini menunjukkan pentingnya kedudukan pendidikan agama Islam di sekolah dan di dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yakni manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki

³ *Ibid*, hlm 7

⁴ Rahmayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta Pusat: Kalam Mulia, 1995), hlm.1-4

pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri dan bertanggung jawab kemasyarakat dan kebangsaan.⁵

Dari tujuan pendidikan nasional diatas, ditegaskan bahwa salah satu ciri manusia Indonesia yang menjadi tujuan pendidikan nasional ialah manusia yang beriman dan bertakwa. Agar beriman dan bertakwa ini dapat terwujud, mutlak diperlakukan adanya pendidikan keimanan dan ketakwaan. Dan itulah pendidikan agama.

Tujuan pendidikan nasional tersebut, menempati hirarki tertinggi jika dilihat dari taksonomi tujuan pendidikan. Ibarat sebuah pohon dimana tujuan pendidikan nasional sebagai batangnya, sedangkan tujuan kelembagaan (institusional) dan tujuan pengajaran (kurikuler) adalah sebagai cabang dan rantingnya.

Pada dasarnya pendidikan adalah upaya untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu hidup dengan baik. Sebuah upaya untuk meingkatkan mutu pendidikan khususnya pendidikan Islam di Indonesia tidak pernah berhenti dan selesai. Berbagai konsep dan wawasan baru itu diharapkan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia agar mampu bersaing secara global. Dengan demikian persoalan peningkatan mutu pendidikan sangat perlu dikaji dan diperjuangkan.

Untuk merealisasikan perjuangan dalam meningkatkan mutu pendidikan maka perlu adanya pembenahan dari segi sumber daya manusianya, lembaga

⁵ Undang-undang dan peraturan pemerintah RI, Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, (jakarta: dirjen pendidikan islam depag RI, 2006), hlm. 8-9

penyelenggara pendidikannya seperti MI, MTS, MA dan perguruan tinggi dan semuanya itu perlu didukung oleh sumber daya pendidikan yang layak. Sumber daya pendidikan itu antara lain: tenaga ahli atau guru, manajemen, kurikulum, sarana dan prasarana serta dana yang diadakan dan didaya gunakan oleh pemerintahan, masyarakat, keluarga, peserta didik baik secara sendiri-sendiri maupun dalam membentuk kerjasama.⁶

Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memperdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif, guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah. Dalam kerangka inilah, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tampil sebagai alternatif paradigma baru manajemen pendidikan yang ditawarkan.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi kegiatan masyarakat dan pemerintahan.⁷ Dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), peran peserta dan dukungan masyarakat, baik dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sangat dibutuhkan.

⁶ Sukirno, *pedoman kerja komite sekolah* (yogyakarta: Pustaka widyamata,2006), hlm. 3

⁷ E.Mulyasa , *manajemen berbasis sekolah*, (Bandung PT. Remaja Rosada Karya, 2006), hlm.

Untuk menampung peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan, maka dibentuklah komite sekolah.

Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan eksistensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Tujuan komite madrasah:

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.⁸

Fungsi komite madrasah:

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintahan berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

⁸ Permendikbut nomor 75 tahun 2017 tentang komite sekolah

3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - a. Kebijakan dan program pendidikan.
 - b. Rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS).
 - c. Kriteria kinerja satuan pendidikan.
 - d. Kriteria tenaga pendidikan.
 - e. Kriteria fasilitas pendidikan, dan.
 - f. Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.⁹

Keberadaan komite sekolah ini telah mengacu pada undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran peserta serta masyarakat perlu dibentuk dewan pendidikan, baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat sekolah. Amanat rakyat dalam Undang-Undang tersebut telah

⁹ Permendikbut nomor 75 tahun 2017 tentang komite sekolah

ditindak lanjuti dengan keputusan menteri pendidikan nasional nomor 004/U/2002 tanggal 2 April tentang dewan pendidikan dan komite sekolah.¹⁰

Dalam lampiran II: keputusan menteri pendidikan nasional No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang acuan pembentukan komite sekolah, dinyatakan bahwa keberadaan komite sekolah berperan sebagai berikut:

1. pemberian pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah (*executive*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.¹¹

Berdasarkan keputusan Mendiknas tersebut, komite sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Untuk penanaman badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite

¹⁰ Hamza B . Uno, *Profesi Kependidikan*, (Jakarta PT, Bumi Aksara, 2007), hlm. 92

¹¹ Kepmendiknas SK No. 004/U/2002, tentang *acuan pembentukan komite sekolah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 122

Sekolah, Majelis Madrasah, Majelis Sekolah, Komite TK, atau nama-nama lain yang disepakati bersama.¹²

Untuk dapat memperdayakan dan meningkatkan peran serta masyarakat, sekolah harus bisa membina kerjasama dengan orang tua dan masyarakat, menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah. Itulah sebabnya paradigma MBS mengandung makna sebagai manajemen partisipatif yang melibatkan peran orang tua serta masyarakat sehingga semua kebijakan dan keputusan bersama, untuk mencapai keberhasilan bersama. partisipasi ini perlu dikelola dan dikordinasikan dengan baik agar lebih bermakna bagi sekolah, terutama dalam meningkatkan mutu dan efektifitas pendidikan lewat suatu wadah yaitu dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan komite sekolah di setiap satuan pendidikan.

MAN 1 Palembang merupakan salah satu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang menyikapi dengan serius permasalahan pendidikan yang telah lama memperhatikan terutama yang menyangkut masalah peningkatan mutu pendidikan tak terkecuali peningkatan sarana dan prasarana madrasah, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwasanya di MAN 1 Palembang masih terdapat kekurangan ruangan belajar, laboratorium, perbaikan gedung yang rusak sedangkan dana yang dikeluarkan oleh kementerian Agama belum mencukupi untuk pengadaan sarana dan prasarana tersebut, maka dibentuklah sebuah komite madrasah guna untuk memenuhi sarana dan prasarana tersebut namun MAN 1

¹² *Op.cit*, hlm. 89-90

Palembang mengikut sertakan pihak komite madrasah sebagai patner kerjanya. Langkah ini diambil karena pihak lembaga menyadari bahwa berpikir, berbuat dan bekerja akan lebih baik jika dilakukan dengan bersama.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa masyarakat dapat ikut serta dalam menyukseskan pendidikan putra-putrinya dengan mutu yang lebih baik. Karena itu juga, hal ini sebagai bagian dari respon terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan dalam beberapa Undang-Undang dan keputusan Menteri Pendidikan Nasional yang terkait dengan pengikut sertaan masyarakat dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian yang penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul **“PERANAN KOMITE MADRASAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI MAN 1 PALEMBANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan komite dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah di MAN 1 Palembang ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat peranan komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang ?

C. Tujuan dan Manfaat peneliti

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana peranan komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang.

b. Untuk mengetahui faktor pendukung yang menghambat peran komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan peran komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam.
- b. Secara praktis, dapat bermanfaat bagi para pembaca, pengajar dan para pihak yang berkecimpung dalam lembaga pendidikan pada umumnya serta bagi penulis khususnya agar menyadari betapa pentingnya peran komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan kepustakaan merupakan kumpulan hasil penelitian yang relevan. Maksudnya meninjau atau memeriksa kepustakaan, baik kepustakaan fakultas Tarbiyah maupun institut serta skripsi atau karya ilmiah yang bersangkutan dengan permasalahan yang akan diteliti yang lebih mengkhhususkan pengkajian terhadap penelitian yang terdahulu untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah ada mahasiswa yang meneliti dan membahasnya. Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap beberapa kepustakaan, maka diketahui sudah ada beberapa hasil penelitian yang bisa dijadikan rujukan, diantaranya adalah:

Dalam jurnal Sri Wardiyah, Djailani, "*Strategi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan*" hasil penelitiannya mengemukakan yaitu komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan telah dilaksanakan dalam berbagai

kegiatan. Komite sekolah memberikan keterangan beberapa strategi yang dilakukannya salah satu pembentukan struktur komite sekolah dalam rapat rutin komite sekolah dengan pihak sekolah tiap tiga bulan sekali atau tiap akhir semester selain itu, strategi lainnya adalah pihak komite sekolah merencanakan dan melaksanakan pelaksanaan hari-hari besar agama dan nasional bersama-sama dengan sekolah lainnya agar jalinan komunikasi dan silaturahmi terjaga dengan pihak sekolah.¹³

Dalam jurnal M. Misbah, "*Peranan dan fungsi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan*" hasil penelitiannya mengemukakan yaitu pada dasarnya posisi komite sekolah berada di tengah-tengah antara orang tua murid, murid, guru, masyarakat setempat, dan kalangan swasta di satu pihak dengan pihak sekolah sebagai institusi, kepala sekolah. Dinas pendidikan wilayahnya, dan pemerintahan daerah di pihak lainnya. Peran komite sekolah di diharapkan dapat menjembatani kepentingan keduanya, dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran komite sekolah diharapkan menjadi jembatan penghubung antara sekolah dengan pihak luas serta dapat menyalurkan aspirasi dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran.¹⁴

¹³ Sri wardiah, Murniati, Djailani, *Strategi komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SDN 1 Lhoknga*, Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Vol 3, No.2, Mei 2015, ISSN 2302-0156, hlm.17

¹⁴ M. Misbah, *Peranan dan fungsi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan*, Insania Vol. 14 no, Jan-Apr 2009, hlm. 169

Dalam jurnal Selvi Maryani, Desi Nurhikmahyanti, “*peranan komite sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana*” hasil penelitiannya mengemukakan yaitu, sebagai realisasi dari berbagai peran dan fungsi komite sekolah serta manifestasi dari sistem pendidikan yang demokratis maka komite sekolah melakukan akuntabilitas publik secara periodik kepada *stakeholder*. Dengan demikian, kemajuan, keberhasilan serta kelebihan sekolah, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam sarana prasarana pendidikan dapat diketahui dan dinikmati bersama. Hal ini berakibat mereka sebagai pengguna/pelanggan (*customer*) jasa pendidikan maupun patner akan merasa puas terhadap pelayanan (*service*) sekolah tersebut. Sebaliknya, apabila diketahui bahwa sekolah terkait mengalami kemunduran , kegagalan serta kekurangan maka dengan serta merta komite sekolah beserta *stakeholder* akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari solusi bersama demi kesuksesan bersama dan peningkatan mutu sekolah tersebut.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis di sini akan mengadakan penelitian tentang peranan komite madrasah. Adapun yang membedakan dengan jurnal terdahulu, pada penelitian ini peneliti lebih menekankan pada mutu pendidikan, yang mana pada penelitian terdahulu lebih ditekankan pada kualitas pendidikan dan sarana dan prasarana sekolah.

¹⁵ Selvi Maryani, Desi Nurhikmahyanti, *Peranan komite sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana di SD Negeri Pucang IV Sidoarjo*, Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan, Vol. 4 no. 4 April 2014, hlm. 163-176

E. Kerangka teori

1. Komite sekolah

a) Pengertian Komite Sekolah

Perubahan paradigma pemerintah dari sentralisasi ke desentralisasi telah membuka peluang masyarakat untuk meningkatkan peran sertanya dalam pengelolaan pendidikan. Salah satu upaya untuk meningkatkan peluang berpartisipasi tersebut adalah melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang mengacu kepada Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa komite sekolah adalah partisipasi yang berlaku pada masyarakat selama ini belum diartikan secara universal. Para perencana pembangunan termasuk di dalamnya pejabat pemerintah, mengartikan partisipasi sebagai dukungan terhadap program atau royek pembangunan yang direncanakan dan di tentukan oleh pemerintah. Besarnya partisipasi masyarakat sering diukur oleh seberapa besar sumbangan yang diberikan masyarakat yang ikut menanggung biaya pembangunan, apakah itu berupa uang atau tenaga. Makna partisipasi yang berlaku secara universal adalah kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan suatu program pembangunan.¹⁶

¹⁶ Depertamen Agama RI. *Pedoman Komite Sekolah* (Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam). 2003. Hlm. 9

Sebagai konsekuensi perluasan makna partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, maka diperlukan suatu wadah yang dapat menampung dan menyalurkan pikiran, gagasan, dalam mengupayakan kemajuan pendidikan yang diberi nama Komite Sekolah. Dalam hal ini, Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan sekolah, baik pendidikan prasekolah maupun pendidikan dasar dan menengah. Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non-profit dan non-politis, yang dibentuk berdasarkan musyawarah demokratis para *stakeholder* pendidikan sekolah, sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.¹⁷

Komite sekolah berkedudukan disetiap satuan pendidikan, yaitu sekolah, pada seluruh jenjang pendidikan, dari jenjang pendidikan, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah baik sekolah negeri maupun swasta. Pada setiap sekolah terdapat satu komite sekolah. Dalam hal terdapat beberapa sekolah pada satu lokasi, atau beberapa sekolah yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi berdekatan, atau beberapa sekolah yang

¹⁷ Depertamen Agama RI. *Pedoman Komite Sekolah* (Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam). 2003. hlm. 9-11

dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya, dapat dibentuk kordinator komite sekolah.

Komite sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Komite sekolah memiliki kemandirian masing-masing, tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama sejalan dengan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).¹⁸

b) Tujuan Komite Sekolah

Berdasarkan buku pedoman Komite Sekolah tujuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah sebagai berikut:

- 1) Mewadahi dan menyalurkan inspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan
- 2) Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan di satuan pendidikan
- 3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.¹⁹

c) Peran dan Fungsi Komite Sekolah

¹⁸ *Ibid*, hlm. 9-11

¹⁹Departamen Agama RI. *Pedoman Komite Sekolah* (Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam). 2003, hlm. 14-16

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Sayangnya ungkapan bijak tersebut sampai saat ini lebih bersifat slogan dan masih jauh dari harapan yang sebenarnya. Boleh dikatakan tanggung jawab masing-masing masih belum optimal, terutama peran serta masyarakat yang sampai saat ini masih dirasakan belum banyak diberdayakan.²⁰

Peran serta masyarakat dalam pendidikan telah dikemukakan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pasal 54. Dan secara spesifik, pada pasal 56 disebutkan bahwa di masyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolah atau komite madrasah, yang berperan sebagai berikut:

- 1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- 2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.

²⁰ Hasbullah .*Otonomi Pendidikan* (Jakarta: Pt Gaja Grafindo Peraja), hlm 91

- 3) Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.²¹

2. Mutu Pendidikan

a. Pengertian mutu pendidikan

Program mutu sebenarnya berasal dari dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, baik yang bersifat produksi maupun jasa, program mutu merupakan program utama sebab kelanggengan dan kemajuan usaha sangat ditentukan oleh mutu sesuai dengan permintaan dan tuntutan pengguna. Permintaan dan tuntutan pengguna terhadap produk dan jasa layanan yang diberikan harus selalu ditingkatkan. Dewasa ini, mutu bukan hanya menjadi masalah dan kepedulian dalam bidang bisnis, melainkan juga dalam bidang-bidang lainnya, seperti permintaan, layanan sosial, pendidikan, bahkan bidang keamanan dan ketertiban sekalipun.²²

Secara etimologis, mutu adalah derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa baik yang tangible maupun intangible. Menurut Juruan (1962) mutu adalah kesesuaian dengan tujuan atau manfaatnya. Crosby (1979) berpendapat

²¹Republik Indonesia UU RI No 20 Tahun 2003, hlm. 29

²² Nana Syaodih Sukmadinata. Dkk, *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah: Konsep, Prinsip, dan Instrumen*(Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 8

bahwa mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan yang meliputi availability, delivery, realibility, maintainability, dan cost effectiveness. Sementara itu, Deming (1982) menyatakan bahwa mutu harus bertujuan memenuhi kebutuhan siswa sekarang dan dimasa yang akan datang. Menurut Elliot (1993) kualitas/mutu adalah sesuatu yang berbeda untuk orang yang berbeda dan tergantung pada waktu dan tempat, atau dikatakan sesuai dengan tujuan. Menurut Goetch dan Gavis (1995), “kualitas/mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan layanan, orang, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan.”²³

Secara umum mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup sarana prasarana pendidikan.

Istilah pendidikan adalah istilah generik, dalam arti dapat diartikan secara luas atau sempit. Lodge dalam bukunya *Philosophy at Education* menyatakan dalam arti luas, pendidikan adalah “*in the wider sense, all experience is said to the educative life is education is life*”, sedangkan dalam pengertian sempit Lodge mengemukakan pendidikan berarti penyerahan adat istiadat (tradisi) dengan latar belakang sosialnya, pandangan hidup masyarakat itu kepada warga masyarakat generasi berikutnya. Dalam

²³ Rusman, *Manajemen Kurikulum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 554

pengertian lebih khusus lagi Lodge menyatakan bahwa pendidikan dalam praktiknya identik dengan sekolah pengajaran formal dalam kondisi-kondisi yang diatur.²⁴

Dalam SISDIKNAS (UU RI No. 20 Tahun 2003) pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.²⁵

Jadi bisa disimpulkan mutu pendidikan adalah jika prestasi sekolah, khususnya prestasi siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam prestasi akademik, berupa nilai ulangan umum, UN, karya ilmiah, lomba-lomba akademik, dan prestasi non akademik, seperti misalnya IMTAQ, kejujuran, kesopanan, olahraga, kesenian, keterampilan, kejujuran dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada

²⁴ Tobroni, *Pendidikan Islam*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2008), hlm. 11

²⁵ Redaksi Sinar Grafika, *UU RI Sisdiknas No 20 Th 2003*, hlm. 3

kondisi yang alami (*natural setting*). Selain itu, data yang terkumpul lebih bersifat kualitatif.²⁶

2. Jenis dan sumber data

a. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek.²⁷

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

- 1) Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Sumber data primer dalam penelitian ini yakni terdiri dari siswa, guru dan kepala MAN 1 Palembang dan pengurus komite.
- 2) Data sekunder merupakan sumber data peneliti secara tidak langsung, melalui media perantara (diperoleh dan di catat, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.

Adapun sumber data sekunder berupa data yang diperoleh dari buku-buku, laporan, jurnal dan lain-lain untuk melengkapi sumber primer.

²⁶ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2016) hlm 14

²⁷ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 251

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian yang menjadi informan peneliti adalah Guru, Staf sekolah, Wali murid dan Anggota Komite Sekolah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis pakai pada penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.²⁸

Observasi ini digunakan penulis untuk memperoleh data yang relevan terhadap penelitian tentang peranan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang. Disini penulis meninjau langsung kelapangan untuk meneliti fenomena yang terjadi di Man 1 Palembang.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*Interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*Interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) atau wawancara dengan sumber informasi,

²⁸ Sugiyono, *metode penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2016). hlm 226

dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dari telah diranvang sebelumnya.²⁹

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen ini berupa teks tertulis, *artefacts*, gambar, maupun foto.³⁰ Dokumen ini digunakan untuk mendapatkan data tentang keadaan peserta didik, guru, dan sarana prasarana yang ada di MAN 1 Palembang. Jadi dapat simpulkan bahwa dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggal yang tertulis seperti arsip-arsip, buku dan lain-lainnya.

5. **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dapat dilakukan setelah data-data telah terkumpul melalui teknik analisis data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Saya sebagai penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan beberapa langkah diantaranya penyajian data, menganalisa data dan menyimpulkan data.

²⁹ A. Muri Yusuf, *Op, Cit*, hlm 372

³⁰ A. Muri Yusuf, *Op, Cit*, hlm 391

Dimana teknik analisis data yang digunakan dalam peneliti ini adalah model miles and Huberman dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:³¹

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan di verifikasi.³²

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Pada bagian ini, peneliti memilah dan memilih data hasil wawancara dengan beberapa guru di MAN 1 Palembang sehingga peneliti bisa mendapatkan hasil kesimpulan akhir.

b. Data *Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Bentuk display data dalam penelitian kualitatif

³¹ Sugiyono, *Op, Cit*, hlm 246

³² *Ibid.* hlm. 408

yang paling sering yaitu teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi dimasa lampau.³³

Dalam penelitisn kualitatif, penyajia data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian, hubungan antara katagori, *flowchart*, dan sejsnisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

Pada bagian ini, peneliti menyajikan data dari hasil reduksi data dengan bentuk uraian singkat. Uraian singkat peneliti dapatkan setelah melakukan wawancara dengan beberapa guru di MAN 1 Palembang.

c. Kesimpulan (*verifikasi*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitaif menurut Miles dan Hubennan adalah penarikan kesimpulan (*verifikasih*). Penarikan kesimpulan (*verifikasih*), yaitu makna-makna yang muncul dari data yang harus diuji keberannya, kekokohnya, dan kecocokanya yaitu berupa validasi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah mengetahui secara keseluruhan isi dari proposal penelitian ini, maka disusun suatu sistematika pemabahasan sebagai berikut:

³³ *Ibid*, hlm. 40

BAB I : PENDAHULUAN. Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tujuan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI. Tinjauan tentang peranan komite sekolah dan mutu pendidikan (pengertian komite tujuan dan manfaat komite sekolah, peran dan fungsi komite sekolah). Tinjauan tentang mutu pendidikan (pengertian mutu pendidikan).

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN. Meliputi sejarah singkat data letak geografis MAN 1 Palembang, visi dan misi, struktur organisasi Madrasah, keadaan guru dan pegawai, keadaan siswa/anak, keadaan sarana dan prasarana, kegiatan siswa.

BAB IV : ANALISIS DATA. Merupakan tahap analisis data tentang peranan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang.

BAB V : PENUTUP. Dalam bab ini diberikan kesimpulan dari apa-apa yang menjadi pokok bahasan dan sekaligus memberikan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peranan dan Fungsi Komite Madrasah

1. Pengertian Peranan

Menurut Soekarto peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan peranan.³⁴ Istilah “peran” atau “peranan” kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar kata peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Atau “peran” dikaitkan dengan “apa yang dimainkan” oleh seorang aktor dalam suatu drama. Jadi peran adalah kedudukan yang berkaitan oleh seseorang guna mendapatkan posisi tertentu

Komite madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.³⁵

Dalam kependiknas dengan tegas dinyatakan bahwa komite sekolah adalah badan usaha mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan.³⁶ Dalam kependiknas nomor 044/U/2002 tersebut ditegaskan bahwa dewan pendidikan (DP) berkedudukan di Kabupaten atau

³⁴ Soejono Soekanto, *sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta: Rajawali pers, 1989), hlm. 220

³⁵ Team Media, *UU RI No 20 Th 2003 Tentang Sisdiknas*, (Surabaya: Media Centre, 2003), hlm. 7

³⁶ Sri Renani Pantjastuti, *Komite Sekolah*, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008), hlm. 81-83

kota, sedang komite sekolah (KS) berkedudukan disatuan pendidikan, baik pendidikan sekolah atau madrasah maupun pendidikan luar sekolah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa komite sekolah atau madrasah, sebagai lembaga mandiri yang berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan dukungan tenaga, sarana prasarana, dan berperan aktif serta pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan.

2. Peran komite sekolah

Komite sekolah mengemban empat peran sebagai berikut: (1) memberi pertimbangan, (2) pendukung, (3) pengawas, dan (4) mediator. Keempat peran komite sekolah tersebut bukan peran yang berdiri sendiri melainkan merupakan peran yang saling terkait antara peran satu dengan peran lainnya.³⁷

- a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Pemberi dukungan (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Melakukan pengawasan (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

³⁷ *Ibid*, hlm. 81

d. Mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dan dengan masyarakat di satuan pendidikan.³⁸

Masyarakat yang merupakan lembaga ketiga, sebagai lembaga pendidikan, dalam konteks penyelenggaraan pendidikan itu sendiri besar sekali peranannya. Berikut ini adalah beberapa peranan dari masyarakat terhadap pendidikan (sekolah) yaitu:

- a . Masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah.
- b . Masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan sekolah tetap membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan sekolah.
- c . Masyarakat yang ikut menyediakan tempat pendidikan seperti gedung-gedung museum, perpustakaan, panggung-panggung kesenian, kebun binatang dan sebagainya.
- d . Masyarakatlah yang menyediakan berbagai sumber untuk sekolah. Mereka dapat diundang kesekolah untuk memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu masalah yang sedang dipelajari anak didik. Orang-orang yang punya keahlian khusus banyak sekali terdapat dimasyarakat, seperti petani, peternak, saudagar, polisi, dokter, dan sebagainya.
- e . Masyarakat sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belajar. Disamping buku-buku pelajaran, masyarakat memberi bahan pelajaran yang

³⁸ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 92

banyak sekali, antara lain seperti aspek alami industri, perumahan, transport, perkebunan, pertambangan, dan sebagainya.³⁹

Salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, termasuk dalam meningkatkan sumber dana dalam penyelenggaraan pendidikan. Peran serta masyarakat dalam pendidikan dapat berupa perorangan, kelompok, ataupun lembaga seperti dunia usaha dan industri. Peran serta masyarakat dalam pendidikan akan lebih efektif karena secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat itu sendiri, antara lain melalui komite sekolah.⁴⁰

Dalam jangka panjang, pendidikan adalah proses pembudayaan, studi mutakhir membuktikan bahwa budaya sekolah (*school culture*) memegang peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Budaya sekolah yang dimaksud adalah norma-norma yang berlaku dan dilaksanakan oleh warga sekolah, yang mampu menumbuh kembangkan kesadaran diri, watak, etos kerja, disiplin kerjasama, sikap pluralitas dalam berbagai aspek kehidupan, kreatifitas, produktifitas, kemampuan berfikir kritis, solidieritas, toleransi, dan daya saing anak didik, untuk itu diperlukan dukungan pihak-pihak yang terkait

³⁹ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 100

⁴⁰ Nurdin Matry, *Implementasi Dasar-Dasar Manajemen Sekolah dalam Era Otonomi Daerah*, (Makasar: Aksara Madani, 2008), hlm. 10-11

agar sekolah dapat melaksanakannya dengan baik, khususnya dari komite sekolah.⁴¹

Dalam buku lain dijelaskan bahwa dalam rangka memberdayakan masyarakat dan lingkungan komite sekolah mempunyai peran sebagai berikut:

- a Memberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekolah, serta menentukan dan melaksanakan kebijakan pendidikan.
- b Mendukung (*supporting agency*) kerjasama sekolah dengan masyarakat, baik secara finansial. Pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
- c Mengontrol (*controlling agency*) kerjasama sekolah dengan masyarakat dalam rangka transportasi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan output pendidikan.
- d Mediator antara sekolah, pemerintah (*eksekutif*) dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD/Legislatif) dengan masyarakat.
- e Mendorong timbulnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- f Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan atau organisasi) dan dunia kerja, pemerintah, dan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 348

- g Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan.
- h Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi bagi kepala pemerintah daerah dan DPRD, berkaitan dengan:
 - 1) Kebijakan dan program pendidikan
 - 2) Kriteria kinerja pendidikan di daerah
 - 3) Kriteria tenaga kependidikan, termasuk kepala sekolah
 - 4) Kriteria sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kemampuan daerah
 - 5) Berbagai kebijakan pendidikan
- i Mendorong orang tua dan masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan kualitas, relevansi, dan pemerataan pendidikan.
- j Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap perencanaan pelaksanaan kebijakan, program dan output pendidikan.⁴²

Dari ulasan diatas jelas sekali bahwa peranan komite sekolah sangat kompleks yakni mulai dari perencanaan, pelaksanaan, mengontrol, mediator, sampai dengan evaluasi pendidikan dan sebagai komite mempunyai peran yang besar dalam peningkatan mutu pendidikan.

⁴² Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 189

3. Fungsi komite sekolah

Fungsi komite sekolah sebenarnya merupakan penjabaran dari peranan komite sekolah tersebut. Artinya satu peran komite sekolah terkait dengan fungsi komite sekolah sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: (1) kebijakan dan program pendidikan, (2) RAPBS, (3) kriteria tenaga kependidikan, (4) kriteria fasilitas pendidikan, dan (6) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
- b. Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan.
- c. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.
- d. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- e. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.
- f. Melakukan kerjasama dengan masyarakat.⁴³

Pendidikan adalah tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah, sekolah hanyalah pembantu kelanjutan pendidikan dalam keluarga, sebab pendidikan yang pertama dan utama diperoleh anak adalah keluarga. Peralihan bentuk pendidikan jalur luar sekolah ke jalur pendidikan

⁴³ Sri Renani Pantjastuti, *Komite Sekolah*, hlm. 83

sekolah (formal) memerlukan kerjasama antara orang tua dan sekolah (pendidikan).⁴⁴

Yang kita maksud dengan tanggungjawab masyarakat ini bukanlah tanggungjawab masyarakat sebagai kelompok, namun tanggungjawab perorangan dan pribadi bagi manusia, sebagaimana masing-masing masyarakat itu menciptakan suatu sistem bagi manusia, sebagaimana masing-masing anggota masyarakat itu menciptakan suatu sistem masyarakat sehingga mendorong masing-masing anggota masyarakat tersebut untuk mendidik sendiri dan bersedia mendidik anggota masyarakat yang lain.⁴⁵

Dalam menyalurkan peranannya komite sekolah secara umum memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Mendorong timbulnya komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- b. Melakukan kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat berkenaan dengan pendidikan yang bermutu.
- c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang digunakan oleh masyarakat.
- d. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan dalam hal kebijakan program pendidikan, penyusunan tenaga kependidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.

⁴⁴ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, hlm. 90

⁴⁵ Munardji, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm. 135

- e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung, peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan.
- g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program penyelenggaraan dan keluaran disatuan pendidikan.⁴⁶ Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak yang berkepentingan.⁴⁷

Selain itu komite sekolah merupakan organisasi orang tua peserta didik atau masyarakat yang berkewajiban membantu penyelenggaraan pendidikan termasuk pelaksanaan bimbingan dan konseling.

Komite sekolah juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- c. Penampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

⁴⁶ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan...*, hlm. 93

⁴⁷ Redaksi Sinar Grafika, *UU RI Sisdiknas No 20 Th 2003*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.

- d. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
- 1) Kebijakan dan program pendidikan
 - 2) Rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS)
 - 3) Kriteria kinerja satuan pendidikan
 - 4) Kriteria tenaga kependidikan
 - 5) Kriteria fasilitas pendidikan, dan
 - 6) Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.⁴⁸
- e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan.
- g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program penyelenggaraan dan keluarga pendidikan disatuan pendidikan (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002).⁴⁹
4. Tujuan pembentukan komite sekolah

Maksud dibentuknya komite sekolah adalah agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai

⁴⁸ Sudarwan Danim, *Variasi Baru Manajemen Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 258

⁴⁹ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, hlm. 94

kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, komite sekolah yang dibangun harus merupakan pengembang kekayaan fisiologis masyarakat secara kolektif. Artinya komite sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (*client model*), berbagai kewenangan (*power sharing and advocaey model*) dan kemitraan (*partnership model*) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.⁵⁰

Sutrisno (1987:145) mengemukakan maksud hubungan sekolah dengan masyarakat (1) untuk mengembangkan pemahaman tentang maksud-maksud dan saran-saran dari sekolah, (2) untuk menilai program sekolah, (3) untuk mempersatukan orang tua murid dan guru dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak didik, (4) untuk mengembangkan kesadaran tentang peningkatan pendidikan sekolah dalam era pembangunan, (5) untuk membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, (6) untuk memberitahu masyarakat tentang pekerjaan sekolah, (7) untuk mengarahkan dukungan dan bantuan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah.⁵¹

Perkembangan dalam pendidikan mengharuskan sekolah mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Elsbree (1959) mengatakan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan sekolah harus berhubungan dengan

⁵¹ Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional...*, hlm. 164

masyarakat, yaitu: (1) faktor perubahan sifat, tujuan, dan metode mengajar di sekolah, (2) faktor masyarakat, yang menuntut adanya perubahan-perubahan dalam pendidikan di sekolah dan perlunya bantuan masyarakat terhadap sekolah, (3) faktor perkembangan demokrasi bagi masyarakat terhadap pendidikan.⁵²

Dalam UU nomor 25 tahun 2000 tentang proses pada butir-butir 4 disebutkan perlunya peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan upaya tersebut antara lain pemerintah membentuk komite sekolah dan dewan pendidikan dengan tujuan utama ikut meningkatkan tanggungjawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002.⁵³

Tujuan dibentuknya komite sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah:

- a. Mewadai dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

⁵² Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Surabaya: Elkaf, 2006), hlm. 106

⁵³ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, hlm. 47

c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.⁵⁴

Dalam UU nomor 25 tahun 2000 tentang propenas pada butir 4 disebutkan perlunya peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, upaya tersebut antara lain pemerintah membentuk komite sekolah dan dewan pendidikan dengan tujuan utama ikut meningkatkan tanggungjawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, komite sekolah dan dewan pendidikan sendiri diatur dalam keputusan menteri pendidikan nasional No 044/U/2002 tanggal 2 April 2002.⁵⁵

B. Mutu Pendidikan

1. Pengertian

Secara etimologis, mutu adalah derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa baik yang tangible maupun intangible. Menurut Juruan (1962) mutu adalah kesesuaian dengan tujuan atau manfaatnya. Crosby (1979) berpendapat bahwa mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan yang meliputi availability, delivery, realibility, maintainability, dan cost effectiveness. Sementara itu, Deming (1982) menyatakan bahwa mutu harus bertujuan memenuhi kebutuhan siswa

⁵⁴ Sri Renani Pantjastuti, *Komite Sekolah*, hlm. 81

⁵⁵ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, hlm. 47

sekarang dan dimasa yang akan datang. Menurut Elliot (1993) kualitas/mutu adalah sesuatu yang berbeda untuk orang yang berbeda dan tergantung pada waktu dan tempat, atau dikatakan sesuai dengan tujuan. Menurut Goetch dan Gavis (1995), “ kualitas/mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan layanan, orang, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan.”⁵⁶

Secara umum mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup saran prasarana pendidikan.

Istilah pendidikan adalah istilah generik, dalam arti dapat diartikan secara luas atau sempit. Lodge dalam bukunya *Philosophy at Education* menyatakan dalam arti luas, pendidikan adalah “*in the wider sense, all experience is said to the educative life is education is life*”, sedangkan dalam pengertian sempit Lodge mengemukakan pendidikan berarti penyerahan adat istiadat (tradisi) dengan latar belakang sosialnya, pandangan hidup masyarakat itu kepada warga masyarakat generasi berikutnya. Dalam pengertian lebih khusus lagi Lodge menyatakan bahwa pendidikan dalam praktiknya identik dengan sekolah pengajaran formal dalam kondisi-kondisi yang diatur.⁵⁷

⁵⁶ Rusman, *Manajemen Kurikulum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 554

⁵⁷ Tobroni, *Pendidikan Islam*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2008), hlm. 11

Dalam SISDIKNAS (UU RI No. 20 Tahun 2003) pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.⁵⁸

Pendidikan menurut Dewey dalam bukunya pendidikan seumur hidup suatu analisis psikologi karangan M. Sardjan mendefinisikan bahwa “pendidikan adalah rekonstruksi atau reorganisasi pengalaman sehingga menambah arti pengalaman dan meningkatkan kesadaran mengarahkan jalan pengalaman berikutnya.⁵⁹

Abdul Malik Bahri dalam bukunya ragam filsafat pendidikan Luqman, pendidikan adalah usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai didalam masyarakat dan kebudayaan pendidikan juga dapat diartikan sebagai bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang berkualitas.⁶⁰

Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, merumuskan hakikat pendidikan sebagai usaha orang tua bagi anak-anaknya dengan maksud

⁵⁸ Redaksi Sinar Grafika, *UU RI Sisdiknas No 20 Th 2003*, hlm. 3

⁵⁹ Sardjan Kadir, *Pendidikan Seumur Hidup Suatu Analisis Psikologi*, (Surabaya: Usaha Nasional, tt), hlm. 50

⁶⁰ Abdul Malik Bahri, *Kajian Filsafat Pendidikan Luqman*, (Tulungagung: Pusat Penerbitan Publikasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2002), hlm. 95

untuk menyokong kemajuan hidupnya dalam arti mamperbaiki tumbuhnya kekuatan ruhani dan jasmani yang ada pada anak.⁶¹

Jika diamati satu persatu dari definisi-definisi pendidikan diatas, terlihat dimensi yang berbeda antara definisi, namun demikian dari keragaman perbedaan tersebut ada titik kesamaan yang dapat dianggap sebagai titik temu setidaknya titik temu tersebut diwakili oleh aspek-aspek proses menuju kedewasaan dan memanusiakan manusia. Diluar kedua dimensi itu, memang kesamaan dan ada juga perbedaan satu pendapat dengan pendapat lainnya. Keragaman ini merupakan kewajaran dan tidak perlu diperdebatkan, sebab secara substansial sebenarnya terdapat titik temu dari beragam definisi yang ada.⁶²

Jadi bisa disimpulkan mutu pendidikan adalah jika prestasi sekolah, khususnya prestasi siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam prestasi akademik, berupa nilai ulangan umum, UN, karya ilmiah, lomba-lomba akademik, dan prestasi non akademik, seperti misalnya IMTAQ, kejujuran, kesopanan, olahraga, kesenian, keterampilan, kejujuran dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya.

2. Dasar dan tujuan pendidikan pada umumnya

Dasar dan tujuan pendidikan adalah merupakan masalah yang sangat pokok dalam pelaksanaan pendidikan, sebab dari dasar pendidikan itu akan

⁶¹ Sikun Pribadi, *Mutiara-Mutiara Pendidikan*, (Jakarta: Erlangga, 1987), hlm. 22

⁶² Ngainun Naim & Sauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep-Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hlm. 31

menentukan corak dan arah pendidikan dan dari tujuan pendidikan akan menentukan kearah mana peserta didik itu akan diarahkan.⁶³

a. Dasar pendidikan

Adapun dasar pendidikan di negara kita secara yuridis telah dirumuskan antara lain:

- 1) Undang-undang tentang pendidikan dan pengajaran No 4 tahun 1959jo 1950 jo nomor 12 tahun 1954, bab III pasal 4 yang berbunyi pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas azas-azas yang termaktub dalam pancasila, undang-undang dasar RI dan kebudayaan bangsa Indonesia.⁶⁴
- 2) Ketetapan MPRA No XXVII/MPRS/1966 bab II pasal 2 yang berbunyi dasar pendidikan adalah falsafah negara pancasila.
- 3) Dalam GBHN tahun 1973, GBHN 1983 dan GBHN 1988 bab IV bagian pendidikan yang berbunyi pendidikan nasional berdasarkan pancasila.
- 4) Tap MPR No II/MPR/1993 tentang GBHN dalam bab IV bagian pendidikan yang berbunyi: pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945.

⁶³ Ahmad Patoni, *Metode Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm. 39

⁶⁴ Sofyan Aman, *Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Kurnia Esa, 1998), hlm. 261

- 5) Undang-undang RI No 2 tahun 1989, tentang sistem pendidikan nasional bab II pasal 2 yang berbunyi pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945.⁶⁵

Pendidikan adalah sesuatu yang universal dan berlangsung terus tak terputus dari generasi ke generasi dimanapun didunia ini. Upaya memanusiakan manusia melalui pendidikan itu diselenggarakan sesuai dengan pandangan hidup dan dalam latar sosial kebudayaan setiap masyarakat tertentu. Oleh karena itu, meskipun pendidikan itu universal, namun terjadi perubahan-perubahan tertentu sesuai dengan pandangan hidup dan latar sosial kultural tersebut. Dengan kata lain, pendidikan diselenggarakan berdasarkan filsafat hidup serta berlandaskan sosio kultural setiap masyarakat, termasuk di Indonesia, kegiatan ketiga berdasarkan itu (filosofis, sosiologis, dan kultural) akan membekali setiap tenaga kependidikan dengan wawasan dan pengetahuan yang tepat tentang bidang tugasnya.⁶⁶

Dasar atau landasan pendidikan menurut Suparlan Suhartanto dalam bukunya wawasan pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Landasan hukum
- 2) Landasan sejarah
- 3) Landasan sosial dan kebudayaan

⁶⁵ Ahmad Patoni, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, hlm. 40

⁶⁶ Umar Tirtoraharja dan S.L Lasulo, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: Rineka cipta, 2005), hlm.

4) Landasan psikologi.⁶⁷

b. Tujuan pendidikan

Seiring dengan beberapa prinsip dan kerangka konseptual dari konsep tarbiyah, sejumlah tujuan-tujuan pendidikan telah dicetuskan menurut pandangan ini, tujuan-tujuan pendidikan adalah untuk mencetak orang yang total dan baik,⁶⁸ yang juga:

- 1) Sadar Tuhan, sadar akan Tuhan dan keesaan-Nya dalam setiap melihat pencipta-Nya.
- 2) Memiliki prinsip
- 3) Berpengetahuan
- 4) Seimbang
- 5) Kooperatif
- 6) Memiliki komitmen
- 7) Berorientasi kepada kemaslahatan.⁶⁹

Adapun tujuan pendidikan nasional Indonesia sedikitnya mengandung sepuluh unsur, yaitu bertujuan untuk:

- 1) Mencerdaskan kehidupan bangsa
- 2) Mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya
- 3) Manusia yang beriman
- 4) Manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

⁶⁷ Suparlan Suhartono, *Wawasan Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hlm. 81

⁶⁸ Zainudin, *Paradigma Pendidikan Terpadu*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 118

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 119

- 5) Manusia yang memiliki budi pekerti yang luhur
- 6) Manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan
- 7) Sehat jasmani
- 8) Sehat rohani
- 9) Memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri
- 10) Manusia yang memiliki rasa tanggungjawab terhadap kemasyarakatan dan bangsa.⁷⁰

Sofyan Aman dalam bukunya “Administrasi Pendidikan” mengemukakan bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.⁷¹

⁷⁰ Ahmad Patoni, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, hlm. 42

⁷¹ Sofyan Aman, *Administrasi Pendidikan*, hlm. 262

BAB III

SETTING WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Madrasah Aliyah Negeri 1 Palembang

Semula Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Palembang merupakan Madrasah Aliyah swasta di bawah naungan badan hukum, yaitu Yayasan Pendidikan Madinatul Ulum (YPMU) yang terdiri dari dua tingkatan. Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah yang didirikan pada tanggal 1 Agustus 1961. Pada mulanya, madrasah tersebut diurus oleh beberapa tokoh masyarakat dan alim ulama setempat di Kelurahan 35 Ilir Barat II Palembang, kemudian diperluas kepengurusannya setelah Yayasan Madinatul Ulum didirikan.⁷² Pada tanggal 4 Agustus 1967, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Yayasan Pendidikan Madinatul Ulum diserahkan kepada pemerintah untuk dinegerikan. Proses penyerahan tersebut melalui kepala kantor Inspeksi Pendidikan Agama Tingkat 1 Provinsi Sumatera Selatan. Sejak penyerahan itu, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah YPMU dinyatakan sebagai Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Persiapan Negeri Kota Madya Palembang.⁷³

⁷²Dokumentasi Tata Usaha MAN 1 Palembang Tahun Pelajaran 2018-2019

⁷³ Dokumentasi Tata Usaha MAN 1 Palembang Tahun Pelajaran 2018-2019

Berdasarkan data dokumentasi di atas diketahui bahwa MAN 1 Palembang telah didirikan sejak 1 Agustus tahun 1961 berlokasi di Kelurahan 35 Ilir Barat

II

Palembang, di bawah naungan Yayasan Madinatul Ulum dan pada 4 Agustus 1967, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Yayasan Pendidikan Madinatul Ulum diserahkan kepada pemerintah untuk dinegerikan.

Berdasarkan SK Menteri Agama RI :

1. Nomor 8 tahun 1968 tanggal 20 Januari 1968, Madrasah Tsanawiyah Persiapan Negeri YPMU Kota Madya Palembang, resmi menjadi MAN 1 Palembang.
2. Nomor 168 tahun 1970 tanggal 4 Agustus 1970, Madrasah Aliyah Persiapan Negeri YPMU, resmi menjadi MAN 1 Palembang.

Dari data di atas diketahui bahwa secara SK pokok MAN 1 Palembang memiliki 2 SK yaitu pendirian dengan Nomor 8 tahun 1968 tanggal 20 Januari 1968 dan SK berubah status menjadi madrasah Negeri dengan Nomor 168 tahun 1970 tanggal 4 Agustus 1970.

B. Identitas Sekolah

Identitas yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang menjelaskan mengenai nama madrasah, NSPN, nomor statistik madrasah, tipe akreditasi madrasah, alamat lengkap, nomor telpon, status dan tata letak/batas-batas madrasah. Untuk lebih jelasnya dijelaskan sebagai berikut:

Nama Sekolah : MAN 1 Palembang
 NPSN : 10604089
 No.Statistik Madrasah: 21167105.001
 Tipe Madrasah : A
 Alamat Sekolah : Jl. Gub H,A, Bastari Jaka baring Palembang

Provinsi : Sumatera Selatan
 Kabupaten/ Kota : Palembang
 Kecamatan : Seberang Ulu 1
 Telepon / Fax : 07115620083/0711562083
 Email : man1plg@kemenag.ac.id

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa MA Negeri 1 Palembang memiliki data data NSPN (10604089), nomor statistik madrasah (21167105.001), tipe akreditasi madrasah A, alamat lengkap Jl. Gub H,A, Bastari Jaka baring Palembang,

C. Visi Misi dan Tujuan MAN 1 Palembang

Visi

“Menuju lulusan berprestasi yang dilandasi iman dan taqwa serta berwawasan lingkungan”.

Indikator Visi :

1. Sekolah unggul “ Unggul Akademis, Tahfiz dan Jurnalis”.
2. Sekolah berkarakter
3. Sekolah Berbudaya
4. Sekolah berwawasan Lingkungan

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa MAN 1 Palembang memiliki 4 visi pokok yaitu menjadi sekolah penyelenggara sekolah unggul “unggul akademis, tahfiz dan jurnalis, berkarakter, berbudaya dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya visi yang ada di jabarkan ke dalam misi sebagai berikut:

Misi

1. Melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien.
2. Memotivasi siswa untuk meningkatkan prestasi akademik dan non akademik.
3. Menciptakan suasana bekerja dan belajar yang kondusif untuk mencetak warga madrasah yang mampu bersaing dalam percaturan global.
4. Membentuk peserta didik yang berakhlak dan berbudi pekerti luhur.
5. Membiasakan siswa membaca Al-Qur'an sebelum memulai pelajaran.
6. Membudayakan untuk disiplin dan memelihara kebersihan lingkungan.
7. Membudayakan sikap kepedulian warga sekolah untuk tidak melakukan pencemaran dan merusak lingkungan hidup.
8. Membudayakan sikap kepedulian warga sekolah terhadap lingkungan hidup.

Secara keseluruhan misi MAN 1 Palembang tergambar pada delapan pokok misi yang di antaranya melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien, memotivasi siswa untuk meningkatkan prestasi akademik dan non akademik, menciptakan suasana bekerja dan belajar yang kondusif untuk mencetak warga madrasah yang mampu bersaing dalam percaturan global, membentuk peserta didik yang berakhlak dan berbudi pekerti luhur, membiasakan siswa membaca al-Qur'an sebelum memulai pelajaran, membudayakan untuk disiplin dan memelihara kebersihan lingkungan, membudayakan sikap kepedulian warga sekolah untuk tidak melakukan pencemaran dan merusak lingkungan hidup dan membudayakan sikap

kepedulian warga sekolah terhadap lingkungan hidup yang ada guna kehidupan lebih baik.

Tujuan Strategis dalam mencapai Visi dan Misi :

1. Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan berkarakter. (T1)
2. Terjaminnya pendidikan lingkungan hidup. (T2)
3. Tersedia dan terjangkau pembelajaran yang berkelanjutan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan era global. (T3)
4. Tersedianya system manajemen yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan.(T4)
5. Terjaminnya pendidikan ramah lingkungan (T5)

Setelah visi dan misi maka selanjutnya yang harus adalah tujuan strategis guna mencapai tujuan dari visi misi itu sendiri maka berdasarkan data di atas ada 5 tujuan strategis yaitu tersedia dan terjangkau layanan pendidikan berkarakter, terjaminnya pendidikan lingkungan hidup, tersedia dan terjangkau pembelajaran yang berkelanjutan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan era global, tersedianya system manajemen yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan dan terjaminnya pendidikan ramah lingkungan dan kondusif sehingga dengan adanya rencana ini diharapkan proses pembelajaran akan menghasilkan output yang diinginkan.

D. Periodisasi Kepemimpinan MAN 1 Palembang

Kepala Madrasah Aliyah sejak berstatus swasta sehingga sekarang telah mengalami beberapa pergantian, yaitu sebagai berikut:

- Periode I : 1 Agustus 1961 - 31 Desember 1968 dijabat oleh K.H.M Agus Salim.
- Periode II : 1 Januari 1969 – 31 Desember 1969 dijabat oleh K.H.M Rasyad.
- Periode III : 1 Januari 1970 – 31 Juli 1970 dijabat oleh Burdawi Aziz.
- Periode IV : 1 Agustus 1970 – 31 Juni 1974 dijabat oleh K.H Abdul Murod.
- Periode V : 1 Juli 1974 – 9 Mei 1983 dijabat oleh Drs. Robinson Maliam.
- Periode VI : 10 Mei 1983 – 30 Oktober 1987 dijabat oleh Drs. Mardha Ali.
- Periode VII : 30 Oktober 1987 – 25 April 1994 dijabat oleh Drs. Abdul Hai Ali.
- Periode VIII : 26 April 1994 – 8 Juli 1998 dijabat oleh Drs. Izuddin
- Periode IX : 9 Juli 1998 – 23 Oktober 2001 dijabat oleh Drs. Abdul Kodir.
- Periode X : 23 Oktober – 5 Mei 2004 dijabat oleh Drs. H. Umar Faruq.
- Periode XI : 5 Mei 2004 – 23 Oktober 2007 dijabat oleh Drs. Nawawi.
- Periode XII : 23 Oktober 2007 – 11 Oktober 2010 dijabat oleh Drs. Kaisar.
- Periode XIII : 11 Oktober 2010 - 09 Maret 2014 dijabat oleh Dra. Hj. Selfi Ariani,
MM
- Periode XIV : 10 Maret 2014 – 02 Januari 2016 dijabat oleh H. Kiagus Faisal, S.Ag,
M.Pd.I
- Periode XV : 03 Januari 2018 s/d sekarang dijabat oleh Rusmala Dewi, S.Pd, MM

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa MAN 1 Palembang sejak berdiri hingga saat ini telah mengalami 15 kali pergantian kepala madrasah dimulai dari 1 Agustus 1961 - 31 Desember 1968 dijabat oleh K.H.M Agus Salim sampai dengan periode kelima belas. Pada Juli 2016 dijabat oleh Buchori, S. Ag. Pada februari 2017 s/d sekarang yang dijabat oleh Ibu Rusmala Dewi

E. Sarana dan Prasarana MAN 1 Palembang

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh MAN 1 Palembang sekarang sudah cukup baik dan layak serta lengkap, hal ini disebabkan karena perhatian Kanwil Kementerian Agama akan majunya mutu pendidikan di MAN 1 Palembang sangat besar karena itu segala kebutuhan yang menyangkut masalah pembelajaran di penuhi semuanya. Begitu juga dengan sarana untuk siswa olah raga juga disediakan dengan harapan agar para siswa MAN 1 Palembang disamping memiliki prestasi yang tinggi dalam belajar juga memiliki prestasi dalam bidang Olah raga. Kesemuanya itu dapat dilihat dalam daftar sarana dan pra sarana yang dimiliki oleh MAN 1 Palembang. Untuk dapat melihat secara lengkap disajikan dalam tabel 1 berikut:

Tabel. 3.1
Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh MAN 1 Palembang

NO	JENIS SARANA	KEBERADAAN			KONDISI			LUAS
		TIDAK	ADA		B	RR	RB	
			PISAH	GABUN				
1	Laboratorium IPA			√	1	√		120
2	Laboratorium Komputer		√		2	√		128
3	Laboratorium Bahasa		√		1		√	96
4	Peribadatan				1			200

5	Ruang Kesenian			√	1	√			15
6	Lapangan Olahraga			√	1	√			2400
7	Lapangan Upacara		√		1	√			2000
8	Ruang Layanan BK			√	1	√			24
9	Ruang Tamu			√	1		√		48
10	RuangUKS		√		1				48
11	RuangOsis			√	1	√			48
12	Kantin Madrasah		√		2		√		60
13	Ruang penjaga			√	1				12
14	Ruang/PosKeamanan		√		1	√			12
15	Kamar Mandi/Wc Guru		√		7		√		15
16	Kamar Mandi/Wc Siswa		√		16		√		48
17	Instalasi Air Bersih (jenis)			√	1		√		
18	Instalasi Listrik (phase)		√			√			
19	Masjid		√		1		√		289
20	GedungSerbaGuna		√		1	√			2000
21	Perpustakaan		√		1	√			96
22	Ruang PMR		√		1				12
23	Koprasi		√		1				12

Sumber: arsip TU MAN Palembang T.A 2018-2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hampir seluruh sarana prasarana yang ada di MAN 1 Palembang dalam kondisi baik, hanya ada beberapa yang rusak ringan seperti lab. Bahasa, ruang tamu, kantin sekolah, kaman mandi siswa dan guru, instalasu air bersih dan manjid.

F. Kondisi Guru

Setelah membahas kondisi sarana dan prasarana maka berikutnya yang akan di dibahas adalah kondisi pendidik atau guru. Jumlah guru MA Negeri 1 Palembang Tahun 2018-2019 yang terdaftar sekarang ini berjumlah 66 orang. Untuk lebih jelasnya dilihat dari table di bawah ini:

Tabel 3.2
Kondisi Guru

NO	NAMA	L/ P	Mata pelajaran	Pendidikan Akhir
1	Hj.Rusmala Dewi	P	B. Inggris	S1. Unsri, Prodi Pendidikan bahasa inggris S.2 Pasca sarjana unsri, (Manajemen)
2	Dra.Mirwani	P	Biologi	S1. Unsri, Prodi Pendidikan Biologi S.2 Manajemen
3	Drs. H.Lazuardi	L	Matematika	S1.Unsri, Prodi Pendidikan Matematikan
4	Nurlela Apriani	P	Kimia	S1. Unsri, Prodi Pendidikan Kimia
5	Drs.Hardinata	L	Matematika	S.1 Universitas PGRI Prodi Matematika
6	Dra .Maimunah	P	Sosiologi	S.1 UNSRI, Prodi Sosiologi
7	Dra.Lisdiana	P	Matematika	S.1 UNSRI, Prodi Pendidikan Matematika
8	Hj.LilisSuryani	P	PPKn	S.1 UNSRI, Prodi Pkn S.2 Unsri Pkn
9	Dra.Susilawati	P	Matematika	S.1 UNSRi, Prodi Pendidkan Matematika
10	Drs.Zawawi	L	PPKn	S.1 Universitas Bengkulu, Prodi PPKn
11	Dra.Sulistiani	P	Matematika	S.2 UNJ, Prodi Matematika
12	Ripki	L	Sejarah	S.1 Sejarah
13	Swarna Dwipa	P	Kimia	S.1, UNSRI, Prodi Kimia
14	NurulHuda	P	Kimia	S.1 UNSRI, Prodi Pendidikan Kimia
15	Rayhana	P	B. Inggris	S.1, UNSRI, Prodi Pendidikan B. Inggris
16	Hj. Nyimas Mariatul	P	Biologi	S.1, UNSRI, Prodi Pendidikan Biologi

17	Fathiah	P	Fiqh, SKI	S.2, UIN Raden Fatah PAI
18	Misnoraliawati	P	Fisika	S.1, UNSRI, Prodi Fisika
19	Desi Nurullita	P	B. Inggris	S.1, PGRI, Pendidikan B. Inggris
20	Eva Irsyadah	P	B. Arab	S.1, UIN Raden Fatah B. Arab S.2 PAI
21	Syafii	L	Kimia	S.1 UGM, Prodi Kimia
22	H. Zainal Abidin	L	Fiqh	S.1. UIN Raden Fatah PAI S.2 Manajemen
23	Sukmawati Pramugari	P	B. Indonesia	S.1 PGRI, Prodi B. Indonesia
24	Hj.A. Musdalifah	P	Q.Hadist,A.Ak hlak	S.1.UIN Syarif Hidayatullah PAI S.2 PAI
25	Zainab	P	Sosiologi	S.1, UNSRI, Prodi Sosiologi
26	Muhamm Muslih	L	B. Inggris	S.1 UMP. Prodi B. Inggris
27	Ayu Jamilah	P	Bimbingan Konseling	S.1, PGRI, PRODI Bimbingan Konseling
28	Kms.A.R.Panji	L	Sejarah	S.1, PGRI. Prodi Pendidikan Sejarah S.2 Manajemen
29	Amalia	P	Fisika	S.2, UNJ, Prodi Fisika
30	Amna Hayati	P	Fisika	S.1, UNSRI, Prodi Pendidikan Fisika
31	Taufiq Marzuqi	L	B. Arab	S.1, UIN Syarif Hidayatullah, Prodi B. Arab S.2 MPI
32	Eduar	L	Matematika	S.1 UNILA, Prodi Matematika
33	Ahmad Alamsyah	L	Ekonomi	S.1, UNJ, Prodi Ekonomi
34	Siti Khodijah	P	B. Indonesia	S.1 PGRI, Prodi B. Indonesia
35	AnnaApriana	P	Ekonomi	S.1 PGRI, Prodi Ekonomi
36	YaniBahar	P	B. Indonesia	S.1 PGRI, Prodi B. Indonesia
37	Uswatun Karokhmah	P	Sosiologi	S.1 UNILA, Prodi Sosiologi
38	Ertiyani	P	B. Indonesia	S.1 PGRI, Prodi B. Indonesia

39	Evi Novilia	P	TIK	S.1,POLTEK Sriwijaya, Prodi Sistem Informasi
40	Mirah	P	Pend.Seni	S.1, PGRI, Prodi Pend.Seni
41	Andi Ismail	L	SKI	S., UIN Raden Fatah, Prodi PAI
42	Emillia Agustina	P	Geografi	S.1, UMP, Prodi Pendidikan Geografi
43	Wahidin	L	Fiqh	S.1, UIN Raden Fatah. Prodi Usuludin, Perbandingan Agama
44	Indra Maranata	L	Pend.Olahrag	S.1,UNIV BINA DARMA, Prodi Pend.Olahrag
45	Kgs. Reza Usman	L	Pend.Seni	S.1 PGRI, Prodi Pend.Seni
46	Deri Indragandi	L	TIK	S.1 UNIV BINA DARMA, Prodi Sistem Informasi
47	Ahmadi	L	A. Akhlak	S.1 UIN RF. Aqidah Filsafat
48	Andi Ismail	L	SKI	S.1 UIN RF Prodi ADAB SKI
49	Marsudi	L	Matematika	S.1 UIN RF , Prodi Pendidikan Matematika
50	Ahmad Qosim	L	Akidah Ahlak	S1,UINSunanKalijaga, Prodi PAI
51	Nyanyu Khusnul Khotimah	P	Matematika	S.1 PGRI, Prodi Matematika
52	Ami Apriani	P	Sejarah	S., UMP, Prodi Sejarah
53	Sari Wulandari	P	Pend. Seni	S.1, PGRI, Prodi Pend. Seni
54	Syahrul Akhyar	L	Biologi	S.1 UMP, Prodi Biologi
55	Fitri Aprilianti	P	Geografi	S.1 UMP, Prodi Geografi
56	Nopitriansyah	L	QH,Fikih	S.1UIN RF, Prodi PAI
57	Kms. Gerbty Nopriansah	L	Sejarah	S.1, UMP. Prodi Sejarah
58	Halimah Russa'diah	P	Prakarya	S.1, PGRI, Prodi Pend. Seni
59	Fatimah Candra Kasih	P	Pend. Seni	S.1, PGRI , Prodi Pend. Seni
60	M. Sholeh	L	B. Inggris	S.1, UNSRI, Prodi B. Inggris
61	Mualimin	P	Penjas	S.1, BINA DARMA, Prodi Pendidikan Olahraga

Sumber: arsip TU MAN Palembang T.A 2018-2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah semua guru yang ada di MAN 1 Palembang adalah 61 orang dengan rincian kaulifikasi pendidikan S.1 dan S.2 jadi jumlah guru tetap sebanyak 42 orang dan guru tidak tetap 19 orang. Jadi secara keseluruhan guru atau tenaga pendidik yang ada di MAN 1 Palembang secara jenjang pendidikan sudah bisa dikatakan baik. Namun jika dilihat dari

kualifikasi pendidikan ada 3 orang guru yang mengampuh mata pelajaran SKI, Fikih dan A. Akhlak yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki di antaranya jurusan PAI, Perbandingan Agama dan Aqidah Filsafat.

G. Kondisi Staf TU

Tabel 3.3
Kondisi Staf T.U

Ijazah	Jumlah		Jumlah
	Tetap	Tidak tetap	
T er ak hi r			
S2	1	-	1
S1	5	3	8
D3	-	2	3
D2/SLTA	-	6	
Jumlah	6	11	17

Sumber: arsip TU MAN Palembang T.A 2018-2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa kondisi staf T.U yang ada di MAN 1 Palembang adalah 17 orang dengan rincian kaulifikasi pendidikan S.2 1 orang tetap, S.1 5 orang tetap dan 3 orang tidak tetap, D.3 2 orang tidak tetap, SMA 6 orang tidak tetap, jadi jumlah staf tetap sebanyak 6 orang dan staf tidak tetap 11 orang.

H. Data Siswa

Data siswa MAN 1 Palembang yang lulus dari tahun 2011 sampai tahun 2018 baik IPA maupun IPS 100% sedangkan secara lengkap dapat dilihat dalam tabel 2 data siswa sebagai berikut:

Tabel 3.4
Data Siswa

NO	TAHUN PELAJARAN	DATA SISWA		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	SISWA
1	2011/2012	237	303	539
2	2012/2013	234	297	531
3	2013/2014	244	388	632
4	2014/2015	271	420	691
5	2015/ 2016	319	513	832
6	2016/2017	332	536	868
7	2017/2018	371	583	954

Sumber: arsip TU MAN Palembang T.A 2018-2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah siswa yang lulus tahun pelajaran 2011-2012 berjumlah 539 (237 laki-laki dan 303 perempuan), tahun pelajaran 2012-2013 berjumlah 531 (234 laki-laki dan 297 perempuan), tahun pelajaran 2013-2014 berjumlah 632 (244 laki-laki dan 388 perempuan), tahun pelajaran 2014-2015 berjumlah 691 (271 laki-laki dan 420 perempuan), tahun pelajaran 2015-2016 berjumlah 832 (319 laki-laki dan 513 perempuan),

tahun pelajaran 2016-2017 berjumlah 868 (332 laki-laki dan 536 perempuan),
tahun pelajaran 2017-2018 berjumlah 954 (371 laki-laki dan 583 perempuan).

I. Prestasi Siswa

Prestasi siswa MAN 1 Palembang khususnya di kota Palembang cukup baik ini dibuktikan dengan beberapa kalinya siswa MAN 1 Palembang mendapat predikat juara I, hal ini karena MAN 1 Palembang ingin agar para siswa tidak saja berprestasi dalam bidang pelajaran namun juga berprestasi dibidang lainnya seperti olah raga, seni dan baca Al qur'an. Uraian secara lengkap prestasi siswa MAN 1 Palembang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
Prestasi Akademis

No	Jenis Lomba	Pestasi Yang di Raih	Tingkat	Tahun
1	Olympiade Sejarah	Harapan 1	Prov. Sumatera Selatan	2014
2	Olympiade Sejarah	Juara 1	Provinsi Sumatera Selatan	2014
3	KSM KTI	Juara 2	Kota Palembang	2014
4	KSM KTI	Juara 3	Kota Palembang	2014
5	KSM Fisika	Juara 1	Kota Palembang	2014
6	KSM Fisika	Juara 2	Provinsi Sumatera Selatan	2014
7	KSM Geografi	Juara 2	Kota Palembang	2014
8	KSM Geografi	Juara 3	Kota Palembang	2014
9	KSM Matematika	Juara 2	Kota Palembang	2015

10	KSM Biologi	Juara 2	Kota Palembang	2015
----	-------------	---------	----------------	------

Sumber: arsip TU MAN Palembang T.A 2018-2019

Tabel 3.6
Pemenang Lomba Karya Tulis & Kreasi Remaja

No	Jenis Lomba	Pestasi Yang di Raih	Tingkat	Tahun
1	Lomba Karya Tulis Kementerian Perikanan dan Kelautan	Harapan 1	Provinsi Sumatera Selatan	2014
Pemenang Lomba Karya Cipta				
1	Lomba Foto Grafy	Juara 2	Prov. Sumatera Selatan	2015
2	Lomba Foto Grafy	Juara 2	Prov. Sumatera Selatan	2015
3	Lomba Pidato Bahasa Inggris	Juara 3	Kota Palembang	2015
4	Kaligrafi	Juara 1	Kota Palembang	2015
5	Kaligrafi	Juara 2	Kota Palembang	2015
6	Lomba 3 R	Juara 2	Kota Palembang	2014
7	Lomba Design Blog tingkat SMA se Kota Palembang	Juara 1	Kota Palembang	2015
8	Lomba design Grafis Se Kota Palembang	Juara 2	Kota Palembang	2016
9	Lomba Jurnali (Honda Ekspresi)	Juara 2	Prov. Sumatera Selatan	2016
10	Duta Pelajar	Juara Favorit	Prov. Sumatera Selatan	2018
Pemenang Lomba Kesenian				
1	Madrasah Singger (Pi)	Juara 3	Kota Palembang	2015
2	Madrasah Singger (Pa)	Juara 1	Kota Palembang	2015
3	3 Siswa Lomba Modelling	Finalis Honda Ekspresi	Provinsi Sumatera Selatan	2015

4	Nasyid	Juara 2	Prov. Sumsel	2016
5	The Best Model in Action Season 9	The Bast Catwal k	Palembang	2016
Pemenang Lomba Olah Raga				
1	Pentaque	Juara 1	Provinsi Sumatera Selatan	2014
2	Pentaque	Juara 2	Nasional	2015
3	Lari 100 M (Pa)	Juara 3	Kota Palembang	2015
4	Lari 100 M (Pi)	Juara 3	Kota Palembang	2015
5	Lari 400 M (Pa)	Juara 2	Kota Palembang	2015
Pemenang Lomba Pramuka				
1	a LTBB Putra	Juara 2	Kota Palembang	015
2	a Hasta Karya Putra	Juara 1	Kota Palembang	015
3	a Hasta Karya Putra	Juara 3	Kota Palembang	015
4	a Hasta Karya Putri	Juara 1	Kota Palembang	015
5	a Hasta Karya Putri	Juara 1	Kota Palembang	015
6	a LTBB Putra	Juara 2	Kota Palembang	015
7	a Pionering mini Putra	Juara 1	Kota Palembang	015
8	a Pionering Mini Putra	Juara 3	Kota Palembang	015
9	a Pionering Mini Putri	Juara 1	Kota Palembang	015
10	a Pionering Mini Putra	Juara 2	Kota Palembang	015
Lomba PMR				
1	a Pertolongan Pertama (pa)	Juara 3	Kota Palembang	013
2	a Pertolongan Pertama (pa)	Juara 3	Kota Palembang	013
3	i PMR	Juara 2	Kota Palembang	013
4	a Perawatan Keluarga	Juara 2	Kota Palembang	013
5	a Pertolongan Pertama	Juara 3	ovinsi Sumatera Selatan	016
Lomba Rohis				

1	Hafizdah Fak Kedokteran UNSRI	Juara 1	Provinsi	2016
2	Hadizdah Fak Kedokteran UNSRI	Juara 1	Provinsi	2016
3	Hafizdah Fak Kedokteran UNSRI	Harapan 1	Provinsi	2016
4	Lomba Dai' Daiyah dalam Rangka Hari santri Oktober 2016	Juara 1	Palembang	2016
5	MTQ BO Alkahfi Di UNSRI	Juara 1	Sumsel	2016

Sumber: arsip TU MAN Palembang T.A 2018-2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa prestasi siswa-siswi di MAN 1 Palembang terdiri dari 2 kategori yakni prestasi akademik dan non akademik dan dari keduanya sudah banyak menghasilkan prestasi.

J. Kegiatan Ekstra Kurikuler

Di MA Negeri 1 Palembang selain kegiatan pembelajaran juga dilaksanakan kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler guna mengembangkan kreativitas anak didik, baik dalam bidang keislaman maupun dalam bidang olahraga serta seni. Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam formal (sekolah) sebagai berikut:

1. Bidang Keislaman dan Umum
 - a. Qashidah atau Rebana
 - b. Nasyid
 - c. Muhadharah
 - d. Pramuka
2. Bidang Olah raga

- a. Futsal
- b. Bulu Tangkis atau Badminton
- c. Tenis Meja
- d. Takkraw
- e. Karate-Do

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa dalam bidang keislaman dan umum ada 4 kegiatan ekstra kurikuler yang di laksanakan (qasidah atau rebana, nasyid, muhadharah/pidato dan pramuka). Sedangkan bidang olahraga ada 5 kegiatan yang dilaksanakan yakni futsal, bulu tangkis/badminton, tenis meja, takraw dan karate-do

K. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Sekolah

1. Kepala Sekolah

Tugas dan tanggung jawab sebagai seorang kepala adalah sebagai berikut

- a. Sebagai guru melaksanakan proses pembelajaran
- b. Sebagai manajer yaitu:
 - 1) Menyusun perencanaan
 - 2) Mengorganisasikan kegiatan
 - 3) Melaksanakan pengawasan
 - 4) Melakukan evaluasi kegiatan
 - 5) Menentukan kebijakan
 - 6) Mengadakan rapat

- 7) Mengambil keputusan
 - 8) Mengatur administrasi ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana dan prasarana dan keuangan (RAPBM)
 - 9) Mengatur organisasi kesiswaan
 - 10) Mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat dan instansi terkait.
- c. Sebagai administrator, menyelenggarakan
- 1) Perencanaan
 - 2) Pengorganisasian
 - 3) Pengesahan
 - 4) Pengkoordinasian
 - 5) Pengawasan
 - 6) Kurikulum
 - 7) Kesiswaan
 - 8) Ketatausahaan
 - 9) Ketenagaan
 - 10) Perpustakaan
- d. Sebagai Supervisor, menyelenggarakan supervisi mengenai:
- 1) Proses belajar mengajar
 - 2) Kegiatan ekstrakurikuler
 - 3) Kegiatan ketatausahaan
 - 4) Kegiatan kerjasama dengan masyarakat dan instansi terkait
 - 5) Sarana dan prasarana

6) Kegiatan 9 K

2. Wakil Kepala Sekolah

Kegiatan-kegiatan kepala sekolah yang dapat dibantu oleh wakil kepala sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, pembuatan, dan pelaksanaan program
- b. Pengorganisasian
- c. Pengarahan
- d. Ketenagaan
- e. Pengawasan
- f. Penilaian

3. Wakil Kepala Urusan Kurikulum

- a. Menyusun program pengajaran
- b. Menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran
- c. Menyusun jadwal dan pelaksanaan ulangan semesteran
- d. Menetapkan kriteria naik atau tidak naik kelas dan menetapkan kriteria kelulusan
- e. Mengatur jadwal pembagian raport dan STTB atau ijazah
- f. Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan satuan pelajaran
- g. Menyusun laporan pelaksanaan pelajaran
- h. Membina kegiatan MGMP.
- i. Membina dan mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang akademis.

4. Wakil Kepala Urusan Kesiswaan:

- a. Menyusun program pembinaan OSIS
- b. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian kegiatan siswa dalam hal disiplin, tata tertib siswa dan pemilihan pengurus OSIS
- c. Mengatur jadwal kegiatan keagamaan
- d. Mengkoordinasikan kegiatan keagamaan dengan kegiatan sekolah yang lainnya
- e. Mengevaluasi kegiatan keagamaan terutama dalam hal materi kegiatan dan teknis pelaksanaan
- f. Mencari terobosan-terobosan baru
- g. Menyusun laporan kegiatan keagamaan secara berkala
- h. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana
- i. Mengkoordinasi penyalagunaan sarana dan prasarana
- j. Mengelola pembiayaan alat-alat pengajaran
- k. Menyusun laporan pelaksanaan urusan sarana dan prasarana berkala.

5. Guru

Tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru adalah sebagai berikut:

- a. Membuat program pengajaran
- b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran
- c. Melaksanakan penilaian belajar, ulangan harian, ulangan umum (semesteran)
- d. Melaksanakan analisis hasil ulangan
- e. Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan
- f. Mengisi daftar nilai siswa

- g. Membimbing siswa dalam kegiatan proses belajar mengajar
- h. Membuat alat pelajaran atau alat peraga
- i. Mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum
- j. Melaksanakan tugas tertentu di sekolah
- k. Menciptakan karya seni
- l. Mengembangkan bidang pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya
- m. Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar siswa
- n. Meneliti absensi siswa sebelum belajar dimulai
- o. Memperhatikan kebersihan kelas atau ruang praktikum

6. Wali Kelas

Tugas dan tanggung jawab sebagai seorang wali kelas adalah sebagai berikut:

- a. Mengelola kelas.
- b. Menyelenggarakan administrasi kelas meliputi:
 - 1) Tempat duduk siswa
 - 2) Daftar piket kelas
 - 3) Buku absen siswa
 - 4) Tata tertib kelas
- c. Mengisi buku legger
- d. Membuat catatan khusus tentang siswa
- e. Mengisi buku laporan hasil belajar (Raport)
- f. Membagikan buku laporan hasil belajar siswa

7. Perpustakaan Sekolah

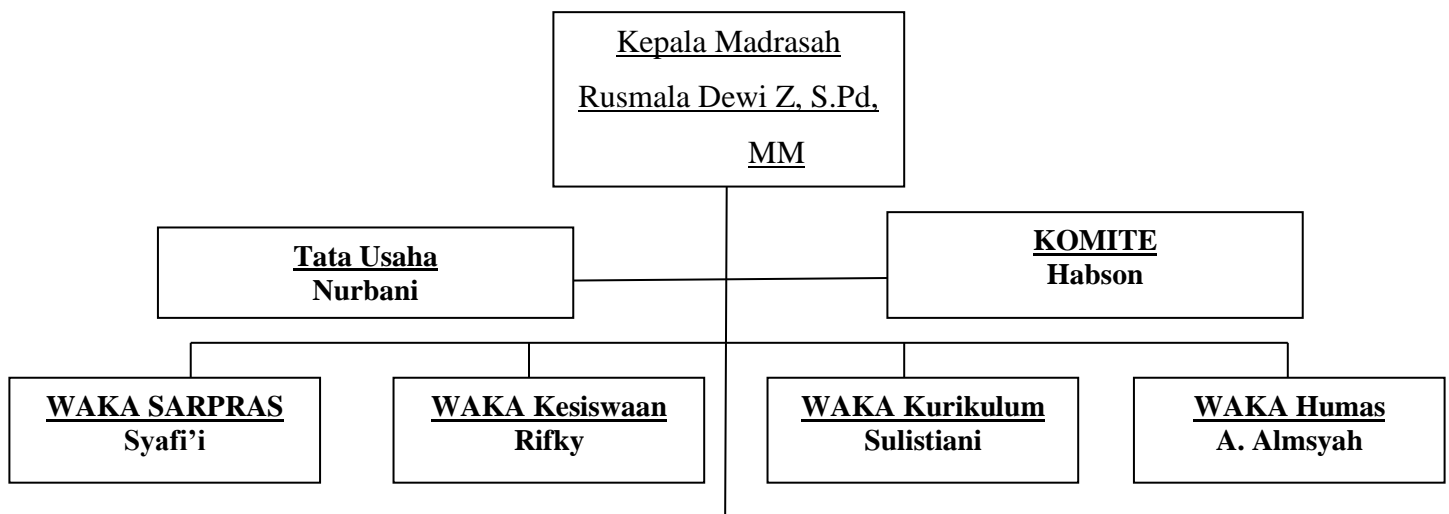
Tugas dan tanggung jawab sebagai pustakan sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Mengurus pelayanan perpustakaan
- b. Merencanakan pengadaan buku atau bahan pustaka dan media elektronik
- c. Memeriksa buku-buku atau bahan-bahan pustaka dan media elektronik
- d. Menginventaris dan membuat administrasi buku-buku atau bahan-bahan pustaka dan media elektronik
- e. Menyimpan buku-buku perpustakaan dan media elektronik

8. Kepala Tata Usaha

Adapun tugas pokoknya adalah melaksanakan ketatausahaan sekolah dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyusun program tata usaha
- b. Mengurus administrasi keuangan dan kesiswaan
- c. Membina dan mengembangkan karir pegawai tata usaha
- d. Menyusun data statistik sekolah, menyusun laporan kegiatan ketatausahaan secara rutin



BAB IV

HASIL PENELITIAN

Sebagaimana telah dijelaskan pada BAB I bahwa untuk memperoleh data terhadap permasalahan yang ada. Peneliti melakukan observasi melakukan peneliti dan wawancara kepada waka humas, kepla TU dan anggota komite di MAN 1 Palembang setelah melakukan observasi dan wawancara peneliti akan menjelaskan secara rinci, sehingga dapat dijadikan kesimpulan dari penelitian ini demi mempermudah menjawab permasalahan yang ada, yang dapat meberikan kesimpulan tentang penelitian ini, maka peneliti akan menganalisis dari masing-masing permasalahan. Pada BAB IV ini, akan dijelaskan secara deskriptif data observasi dan wawancara dilapangan.

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Deskripsi observasi penelitian

Penelitian dilakukan di MAN 1 Palembang dalam penelitian ini, penelitian yang peneliti lakukan ini merupakan penelitian kualitatif. Data diperoleh dari hasil wawancara untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dalam data penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara dengan waka humas, guru dan anggota komite.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tiga tahap, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

Tabel 4.1

Rincian kegiatan penelitian

Waktu	Tanggal	Kegiatan
Observasi	, 4 Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Menyerahkan surat izin penelitian dari kampus ke kemenag provinsi sumatra selatan. • Menyerahkan surat
	7 Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> • izin dari kemenag ke sekolah MAN 1 Palembang. • Melakukan konsultasi dengan kepala TU MAN 1 Palembang. • Menentukan jadwal untuk observasi, wawancara dan dokumentasi .

Setelah peneliti mendapatkan izin dari pihak sekolah untuk melakukan penelitian di MAN 1 Palembang dengan berkonsultasi dengan kepala TU ibu Nurbani peneliti di izinkan melakukan penelitian dengan melakukan wawancara kepada yang bersangkutan Waka humas, kepala TU, dan anggota komite

2. Deskripsi wawancara penelitian

Menganalisis dari pertanyaan yang di ajukan peneliti kepada instrumen penelitian terhadap dua pertemuan yang disepakati antara peneliti dan informan

penelitian yang Pelaksanaan kegiatan wawancara dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan yaitu:

Pertemuan pertama, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2018. Adapun deskripsi kegiatan wawancara, dilakukan wawancara dengan Bapak Ahmad Alamsyah selaku wakil kepala di MAN 1 Palembang. Isi dari wawancara tersebut menanyakan tentang komite madrasah dan bagaimana mutu pendidikan di MAN 1 Palembang.



Gambar 4.1 Wawancara dengan Bapak Ahmad Alamsyah.

Pertemuan kedua, dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2018. Adapun deskripsi kegiatan wawancara, dilakukan dengan Ibu Nurbani selaku kepala TU MAN 1 Palembang dan bapak Syafi'i selaku wakil sarana prasarana evaluasi dan supervisi di MAN 1 Palembang. Isi dari wawancara

tersebut membahas tentang komite madrasah dan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang.



Gambar 4.2 wawancara dengan Ibu Nurbani



Gambar 4.3 wawancara dengan Bapak Syafi'i

Wawancara yang dilakukan peneliti secara langsung oleh peneliti bersama waka humas, waka sarana prasarana, dan kepala TU adalah untuk mengetahui tentang bagaimana peran komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan serta faktor pendukung dan penghambat komite madrasah di

MAN 1 Palembang dalam penelitian ini waka humas, waka sarana prasarana, dan kepala TU merupakan informan penelitian utama.

3. Deskripsi dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan peneliti pada hari senin, 7 oktober 2018 berupa foto-foto lingkungan madrasah yang ada di MAN 1 Palembang dengan bantuan guru-guru di MAN 1 Palembang untuk dapat dipergunakan dengan seperlunya.



Gambar 4.4 Ruang Belajar



Gambar 4.5 Auditorium Man 1 Palembang



Gambar 4.6 Lapangan Man 1 Palembang

B. Peranan komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang

Tahap permasalahan ini, peneliti melakukan penelitian selama 8 hari dengan melakukan pertemuan kepada waka humas untuk melihat peranan komite madrasah di MAN 1 Palembang, peneliti menggunakan teknik wawancara. Wawancara sendiri dilakukan dengan beberapa guru seperti waka humas, kepala TU, anggota komite madrasah di MAN 1 Palembang, sebagai instrumen untuk memperoleh data.

Peran komite madrasah adalah, sebagai lembaga mandiri yang berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan dukungan tenaga, sarana

prasarana, dan berperan aktif serta pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan.

Kepmendiknas dengan tegas dinyatakan bahwa komite madrasah adalah badan usaha mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan. Dalam kepmendikas nomur 044/U/2002 tersebut ditegaskan bahwa dewan pendidikan berkedudukan di kabupaten atau kota, sedangkan komite madrasah berkedudukan disatuan pendidikan, baik pendidikan sekolah ataupun madrasah maupun pendidikan luas madrasah.⁷⁴

Komite madrasah juga mengemban empat peran sebagai beriku:

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan disatuan pendidikan.
2. Pemberi dukungan (*supporting agency*) baik berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan.
3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan disatuan pendidikan.

⁷⁴Sri Rerani Pantjastuti, *komite sekolah*, (Yogyakarta:Hikayat Publishing, 2008),hlm 81-83

4. Mediator antara pemerintahan (*executive*) dengan masyarakat disatuan pendidikan.⁷⁵

Agar komite madrasah dapat berperan dengan baik maka dalam pembentukan pengurusan pun harus dapat memenuhi beberapa prinsip/kaidah dan mekanisme yang benar, serta dapat dikelola oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan anggota komite dilakukan secara akuntabel bahwa anggota komite bertanggung jawab dalam kerjanya.

Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Ahmad Alamsyah selaku waka humas MAN 1 Palembang, beliau menyatakan bahwa:

“Mekanisme pembentukan komite madrasah di MAN 1 Palembang ini terlebih dahulu dirapatkan oleh kepala madrasah guru serta staf madrasah, dan di tindak lanjutin dengan rapat selanjutnya memanggil beberapa orang di antaranya yaitu: tokoh masyarakat sekitar, wali murid-wali murid yang dianggap berpotensi, setelah mereka yang diundang datang, lalu kita mengadakan musyawarah, dan kemudian dilakukan pemilihan, tetapi didalam kepengurusan komite ini tidak ada satupun guru yang terlibat dalam kepengurusan komite di MAN 1 Palembang ini.”⁷⁶

Hal senada yang diungkapkan oleh Ibu Nurbani selaku kepala TU di MAN 1 Palembang beliau mengatakan yaitu:

“Pemilihan anggota komite dan pengurus komite dilakukan secara musyawarah di MAN 1 Palembang pada waktu pemilihan madrasah mengundang wali murid. Agar pemilihan anggota komite dan kepengurusan komite ini bersifat transparan dan juga guru tidak ikut didalam kepengurusan komite madrasah ini, semua diserahkan kepada wali murid”⁷⁷

⁷⁵Keppmendiknas SK No. 004/U/2002, *tentang acuan pembentukan komite sekolah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm 122

⁷⁶ Ahmad Alamsyah, Waka Humas MAN 1 Palembang, *Wawancara*, 10 Oktober 2018.

⁷⁷ Nurbani, Kepala TU MAN 1 Palembang, *wawancara*, 11 oktober 2018.

Jadi dapat disimpulkan bawsanya pemilihan/pembentukan kepengurusan anggota komite madrasah bersifat musyawarah dan demokratis, sesuai dengan SK Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam tentan prinsip pembentukan komite madrasah, yaitu: transparansi, akuntabilitas dan demokratis, serta merupakan mitra satuan pendidikan.

Untuk mengetahui kapan komite madrasah di bentuk, peneliti melalukan wawancara langsung kepada Bapak Ahmad Alamsyah selaku waka humas di MAN 1 Palmbang, yaitu:

“Sebenarnya komite madrasah di MAN 1 Palembang sudah lama di bentuk tetadi sempat fakum, dan di hidupkan kembali pada tahun 2017, kalau tidak salah tanggal 15 Maret 2017.”⁷⁸

Sedangka menurut Bapak Syafi’i selaku waka sarana prasarana, evaluasi dan suvervisi, yaitu:

“Mengatakan bahwa komite madrasah dibentuk sudah lama dan sempat fakum, dan sekarang allhmdulillah sudah kembali berjalan dengan baik dan di ketuai oleh bapak Drs. Habson MM.”⁷⁹

Secara formal, hampir semua sekolah/madrasah telah memiliki perangkat komite sekolah/madrasah sebagai wakil masyarakat dalam membantu program pendidikan di sekolah/madrasah. Kehadiran komite sekolah/madrasah telah menunjukkan sahamnya sebagai mitra sekolah/madrasah, terutama bagi kepala sekolah/madrasah dan guru dalam merancang dan melaksanakan program

⁷⁸Ahmad Alamsyah, Waka Humas MAN 1 Palembang, *Wawancara*, 10 Oktober 2018.

⁷⁹Syafi’i, Waka Sarana Prasarana, evaluasi dan suvervisi MAN 1 Palembang, *Wawancara*, 11 Oktober 2018.

pendidikan, baik program pembanguan fisik maupun non fisik. Seseuai dengan peranya dalam meningkatkan mutu pendidikan.

a. Sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*)

Komite madrasah sebagai badan pemberi pertimbangan terhadap madrasah memiliki arti, bahwa komite madrasah dipandang mitra kerja kepala madrasah yang dapat diajak bermusyawarah tentang masa depan madrasah.⁸⁰ Melalui komite madrasah, orang tua dan masyarakat dapat ikut serta, merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh madrasah, sampai dengan menetapkan cara atau strategi yang akan ditempuh untuk mencapainya yang berupa rumusan kebijakan, program, dan kegiatan madrasah. Selama ini keberadaan komite madrasah sangat berarti sekali bagi setiap satuan pendidikan. Karena komite madrasah merupakan pembantu utama satuan dalam memakmurkan lembaga pendidikan selain masyarakat internal madrasah.

Segala macam program yang akan dilaksanakan madrasah sebaiknya terlebih dahulu dikonsultasikan dengan komite madrasah. Sebab, segala macam kebijakan yang akan diterpkan ataupun yang akan dilaksanakan tidak terlepas dari partisipasi masyarakat internal maupun eksternal

⁸⁰Keppmendiknas SK No. 004/U/2002, *tentang acuan pembentukan komite sekolah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 122

sekolah. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Ahmad

Alamsyah, selaku waka humas di MAN 1 Palembang menyatakan bahwa:⁸¹

“Komite madrasah memberi pertimbangan khususnya dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, misalnya dalam hal pengadaan peralatan laboratorium, pengrehapan ruang kelas, rencana pembangunan ruang kelas, sebelum sekolah mengambil keputusan maka terjadilah diskusi antara kepala komite madrasah dan pihak madrasah.”

Hal senada diungkapkan oleh bapak Syafi'i selaku waka sarana prasarana, evaluasi, dan suvervisi di MAN 1 Palembang, sebagai berikut:

“Komite madrasah sebagai mitra kerja kepala madrasah dapat memeberikan pertimbanganya dalam setiap rencana dan program yang disusun oleh madrasah, misalnya madrasah akan mengajukan rehab sarana prasaranan dan gedung yang rusak, madrasah akan melakukan penambahan 3 lokal ruang kelas, rencana pembangunan laboratorium bahasa, dll. Maka pihak madrasah terlebih dahulu mengkonsultasikan masalah itu kepada komite madrasah agar dapat diberikan masukan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diwakili oleh komite madrasah. dan atas nama masyarakat yang diwakilinya, komite madrasah dapat menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” terhadap rencana program pendidikan yang disusun oleh madrasah.”⁸²

Selain daripada itu, posisi komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan masih berlanjut pada pemberian pada pemberian masukan dan pertimbangan dalam hal rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah

⁸¹ Ahmad Alamsyah, Waka Humas MAN 1 Palembang, *Wawancara*, 10 Oktober 2018.

⁸² Syafi'i, Waka Sarana Prasarana, evaluasi dan suvervisi MAN 1 Palembang, *Wawancara*, 11 Oktober 2018.

(RAPBS), kriteria kinerja satuan, kriteria tenaga kependidikan, dan kriteria fasilitas pendidikan.⁸³

Sebagaimana yang peneliti temukan dilapangan dari hasil wawancara dengan ketua komite MAN 1 Palembang yang menyatakan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang bahwa keterlibatan komite sekolah bersifat menyeluruh, mulai dari pemberian masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS, pemeberi pertimbangan dalam melaksanakan proses pengelolaan pendidikan di madrasah dan mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat untuk di pertimbangkan dan diperbantukan di madrasah. Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Syafi'i.

“Dalam perannya sebagai badan yang memberikan pertimbangan atau nasihat, komite madrasah di MAN 1 Palmbang dalam fungsi perencanaan pendidikan memiliki peran mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang ada di sekolah serta memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) termasuk dalam rapat RAPBS. Dalam pengelolaan terhadap sumber daya pendidikan, antara lain SDM, sarana dan prasarana, dan alokasi anggaran, komite madrasah berperan sebagai mengindentifikaasih berbagai pontensi sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat. Fungsi ini akan dapat berguna dalam memberikan pertimbangan mengenai sumber daya pendidikan yang dapat dipertimbangkan dan diperbantukan di madrasah.”⁸⁴

⁸³Departemen Agama RI. *Pedoman komite sekolah* (Direktorat jendral kelembagaan Agama Islam). 2003

⁸⁴Syafi'i, Waka Sarana Prasarana, evaluasi dan suvervisi MAN 1 Palembang, *Wawancara*, 11 Oktober 2018.

Hal senada diungkapkan juga oleh Bapak Ahmad Alamsyah, selaku waka human di MAN 1 Palembang, sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan program, yang menyangkut: kurikulum, silabus, PBM (Proses Belajar Mengajar), dan penilaian komite MAN 1 Palembang sebagai badan penasihat berperan penting dalam memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan proses pengelolaan pendidikan di madrasah, termasuk pembelajarannya.”⁸⁵

Berdasarkan pernyataan di atas bawasanya dalam meningkatkan mutu pendidikan komite madrasah ikut serta dalam keterlibatannya untuk menerapkan RAPBS dalam pengelolaan SDM, sarana prasarana, dan alokasih anggaran madrasah di MAN 1 Palembang.

b. Sebagai pendukung (*supporting agency*)

Peran komite sebagai badan pendukung bagi penyelenggaraan dan upaya peningkatan mutu pendidikan, dapat berupa dukungan finansila, tenaga, dan dukungan pikiran. Secara nyata pemberian dukungan ini dapat diwujudkan diantaranya dengan pemecahan masalah kekurangan guru, biaya sekolah bagi anak kurang mampu, dan tenaga untuk ikut memperbaiki sekolah yang rusak. Peremberdayaan bantuan sarana dan prasarana yang

⁸⁵ Ahmad Alamsyah, Waka Humas MAN 1 Palembang, *Wawancara*, 10 Oktober 2018.

diperlukan di madrasah melalui sumber daya yang ada pada masyarakat, hal ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan dewan pendidik.⁸⁶

Peran pendukung yang dipegang oleh komite sekolah tidak hanya sebatas memberikan dorongan dan motivasi saja, namun lebih dari itu. Dengan berperan sebagai supporting agency ini, Komite madrasah dapat mendorong dan menyadarkan para orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan.⁸⁷ Karena pendidikan khususnya lembaga (satuan) pendidikan tidak dapat berperan sebagai mana fungsinya sebagai lembaga pembentuk generasi beradab dan berpengetahuan tanpa mendapat dukungan besar dari masyarakat luas.

Pada dasarnya pendidikan yang baik membutuhkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, ruangan kelas yang cukup, serta biaya yang banyak. Akan tetapi selama ini anggaran yang terdapat di madrasah sangat terbatas, oleh karenanya dalam hal ini masyarakat diharapkan menjadi penanggung jawab dan donatur yang memberikan dana demi kelancaran kegiatan pendidikan di madrasah. Masyarakat yang berminat dan bersimpati

⁸⁶Keppmendiknas SK No. 004/U/2002, *tentang acuan pembentukan komite madrasah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm 122

⁸⁷Sri Rerani Pantjastuti, *Komite Sekolah*, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008), hlm 85

dapat memberikan bantuannya melalui berbagai cara, misalnya: membantu penyediaan alat peraga, buku-buku, serta memberikan biaya kepada anak didik yang kurang mampu.⁸⁸

Komite madrasah sangat membantu kemandirian sekolah dalam hal anggaran, fasilitas madrasah yang masih kurang, mencari dana untuk menambah insentif guru, dengan mengajukan bantuan dana tanpa memberatkan orang tua siswa.⁸⁹ Selain fungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dalam hal ini komite madrasah juga berperan dalam penggalangan dana dalam rangka pembiayaan pendidikan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Ahmad Alamsyah, selaku waka humas di MAN 1 Palembang, sebagai berikut:⁹⁰

“Pendanaan yang didapatkan oleh komite sekolah dari hasil iuran orang tua siswa setiap bulannya, dan infaq, tetapi apabila ada orang tua siswa yang ekonominya kurang tidak di pungut iuran tersebut”

⁸⁸*Ibid*, hlm.85

⁸⁹*Ibid*, hlm 86

⁹⁰Ahmad Alamsyah, Waka Humas MAN 1 Palembang, *Wawancara*, 10 Oktober 2018.

Dalam hal ini juga di sampaikan oleh ibu Nurbani selaku kepala TU di MAN 1 Palembang, membenarkan bahwa salah satu anggaran dana di dapat dari iuran orang tua siswa, dan infaq.

Komite madrasah juga membantu dalam hal sarana prasarana di MAN 1 Palembang. Dan tetapi tidak hanya memberikan dukungan dan pengadaan sarana prasarana fisik saja, namun termasuk dalam pengembangan sumber daya manusia. Sebagai mana yang di ungkapkan oleh Ibu kepala TU MAN 1 Palembang, sebagai berikut:

“Selain membantu dalam sarana dan prasaran yang ada di madrasah, komite madrasah juga membantu mengembangkan sumber daya manusianya, yakni dengan memberikan sumbangan saran dan motivasi agar para guru senen tiasa dapat meningkatkan kinerjanya sehinggann madrasah bisa menjadi lebih maju lagi dan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain.”⁹¹

c. Sebagai pengontrol (*controlling agency*)

Peran komite sekolah selanjutnya adalah sebagai pengotrol dalam rangka trasparasi dan akuntabilitas penyelenggaran dan keluaran pendidikan dim sekolah. Pengawasan yang dilakukan oleh komite madrasah meliputi kontrol terhadap pengambilan kepututas dan perencanaan pendidikan di sekolah,di samping alokasi dana dan sumber-sumber daya bagi pelaksana program disekolah. Komite madrasah juga melakukan fungdih kontrolnya terhadap keberhasilan pendidikan di sekolah yang dilihat dari mutu outpun pendidikan. Hasil pengawasan terhadap sekolah akan dijadikan bahan

⁹¹Nurbani, Kepala TU MAN 1 Palembang, *wawancara*, 11 oktober 2018.

pertimbangan yang cukup menentukan bagi penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan.⁹²

Berikut ini hasil wawancara dengan bapak Ahmad Alamsyah, selaku waka humas di MAN 1 Palembang, sebagai berikut:

“Peran komite madrasah di MAN 1 Palembang ini dalam hal *controlling agency* yang bertindak sebagai pengawas atau pengontrol. Yaitu dalam hal keuangan dan jalannya proses belajar mengajar.”⁹³

Hal senada diungkapkan juga oleh bapak Habson, selaku Ketua komite sekolah di MAN 1 Palembang, sebagai berikut:⁹⁴

“Kalau masalah kontrol, saya setiap bulan mengontrol pengeluaran keuangan sekolah sekaligus transparansi penggunaan alokasi dana agar lebih dapat mempertanggung jawabkan . selain itu saja juga mngontrol proses jalanya belajar- mengajar peserta didik di MAN 1 Palembang.” Begitu juga sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Syafi’i selaku

waka sarana prasarana evaluasi dan survivisi, mengungkapkan bahwa peran dalam *controlling agency* komite madrasah tidak hanya terbatas pada finansial saja melainkan dalam urusan pengambilan keputusan dan pengembangan fasilitas. sebagai berikut:⁹⁵

“Komite sekolah peranya dalam pengontrol yaitu melakukan evaluasi dalam setiap kegiatan di madrasah dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan program madrasah, maupun dalam pengembangan dan penambahan fasilitas sekolah, misalnya: buku-buku yang ada di perpustakaan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.”

⁹²Keppmendiknas SK No. 004/U/2002, *Tentang Acuan Pembentukan Komite Sekolah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm 122

⁹³Ahmad Alamsyah, Waka Humas MAN 1 Palembang, *Wawancara*, 10 Oktober 2018.

⁹⁴Habson, Kepala Komite MAN 1 Palembang, *Wawancara*, 15 Oktober 2018.

⁹⁵Syafi’i, Waka Sarana Prasarana, Evaluasi Dan Survivisi MAN 1 Palembang, *Wawancara*, 11 Oktober 2018.

Peran dalam *controlling* ini juga dimaksudkan agar komite madrasah sebagai patner madrasah dan masyarakat memberikan service yang memuaskan, terlebih yang berhubungan dengan input dan otpun yang dihasilkan madrasah harus dapat diterima oleh masyarakat sebgai pengguna.

d. Sebagai Mediator

Komite madrasah sebagai penghubung atau mediator antara pemerintah, sekoah, orang tua, dan masyarakat memiliki arti, bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat akan disalurkan melalyui komite sekolah untuk disampaikan kepada sekolah. Peran sebagai mediator ini memerlukan kecermatan dalam mengidentifikasi kepentingan, kebutuhan dan keluhan orang tua dan masyarakat.⁹⁶

Aspirasi yang disalurkan melalui komite sekolah dimanfaatkan oleh sekolah sebagai masukan bagi koreksi ke arah perbaikan. Komite sekolah juga berperan dalam mengsosialisaikan berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan sekolah sehingga dapat akuntabel (dipertanggungjawabkan) kepada masyarakat. Bagi komite sekolah peran yang halus dijalankan sebagai mediator adalah pemberdayaan sumber daya yang ada pada orangtua siswa bagi pelaksanaan pendidikan sekolah.⁹⁷

⁹⁶Kepmendiknas SK No. 004/U/2002, *Tentang Acuan Pembentukan Komite Sekolah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm 122

Dalam oprasionalnya, komite sekolah sebagai mediator ini lebih banyak untuk ditujukan dalam menjalin kerjasama dengan masyarakat, menampung serta menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Kerjasama dengan masyarakat ini sangat mutlak untu dilakukan sebab sekolah adalah sebuah sistem yang berada di tngah-tengah masyarakat, hidup dan mati lembaga pendidikan tergantung dari peran serta masyarakat.⁹⁸

Begitu juga halnya, dalam setiap menjalankan programnya sekolah maupun komite sekolah senantiasa meminta bantuan kepada masyarakat, sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Habson selaku ketua komite sekolah yang mejelaskan terjalinnya hubungan yang harmonis antara pihak sekolah dengan masyarakat terutama dalam kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan, berikut ini hasil wawancaranya:⁹⁹

“Selain dalam hal pengembangan fisik, komite madrasah berkerjasama dengan pihak sekolah dan masyarakat mengadakan kegiatan ke islaman, contohnya pada hari jumat pagi sebelumproses belajar mengajar di ajakan muhadoroh , dan ketika solat jumat yang laki-laki harus berjamaah solah di sekolah, agar anak-anak tesebut menjadi lebih baik dan berakhlak, ini juga tidak luput dari dukungan masyarakat luas khususnya para orang tau”

Komite madrasah juga berperan menyerap dan menganalisis aspirasi ide, tntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat, baik masyarakat internal sekolah maupun eksternal sekolah. Bagi

⁹⁸*Ibid.*

⁹⁹Habson, Kepala Komite MAN 1 Palembang, *Wawancara*, 15 Oktober 2018

masyarakat internal sekolah (guru, karyawan, dan siswa) keberadaan komite sekolah dengan peran dan fungsinya sebagai mediator ini memberikan support bagi masyarakat internal sekolah itu sendiri, apalagi komite sekolah siap menampung segala keluhan yang dicurahkan untuk dibicarakan bersama jajaran pimpinan sekolah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ahmad Alamsyah selaku waka humas di MAN 1 Palembang, sebagai berikut:¹⁰⁰

“Keberadaan komite madrasah di MAN 1 Palembang ini banyak memberi manfaat, yang mana dengan adanya komite madrasah maka aspirasi siswa dan orang tua dapat tersalurkan dengan terwakilkan, selain itu pihak madrasah juga selalu mendapatkan support dari komite madrasah agar terus dapat meningkatkan mutu pendidikan.”

Sesuai dengan perannya sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat, komite madrasah berusaha untuk memberikan pengarahan dan keterangan yang jelas mengenai kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan hal ini berujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat bahwa pemerintah selalu melakukan upaya perbaikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa peran yang telah dilakukan komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan kepedulian komite

¹⁰⁰Ahmad Alamsyah, Waka Humas MAN 1 Palembang, *Wawancara*, 10 Oktober 2018.

madrasah terutama orang tua siswa untuk membantu, menunjang dan ikut serta demi kelancaran dan pengembangan pendidikan.

C. Faktor pendukung dan penghambat peranan komite madrasah di MAN

1 Palembang

Bahwasanya faktor penghambat dan pendorong akan selalu ditemui dalam dunia pendidikan baik pihak sekolah, komite, masyarakat, pemerintahan, dalam meningkatkan mutu pendidikan.

1. Faktor penghambat

Adalah masalah-masalah yang menyebabkan komite sekolah tidak dapat menjalankan perannya secara optimal, masalah-masalah tersebut ditemukan dalam wawancara dan observasi.

Wawancara dengan bapak Habson selaku ketua komite sekolah di MAN 1 Palembang, sebagai berikut:¹⁰¹

“Tentulah ada faktor penghambat, dan sampai sekarang ini yang menjadi faktor penghambat adalah waktu yang minil dalam kegiatan komite ini di karenakan keenggokaan komite ini hampir merata bekerja di luar sekolah dan juga kegiatan organisasi ini bukan pula pekerjaan pokok kami sehingga memang di perlukan keikhlasan untuk menyisikan waktu.”

Hal serupa juga yang diungkapkan oleh bapak Ahmad Alamsyah selaku waka humas di MAN 1 Palembang, sebagai berikut:

“Faktor Penghambatan dari peran komite tentu ada di antaranya, untuk sekarang keanggotaan komite tidak bisa menetap disekolah setiap hari, di karnakan sebagian anggota komite madrasah sebagai PNS di luar sekolah.”¹⁰²

¹⁰¹Habson, Kepala Komite MAN 1 Palembang, *Wawancara*, 15 Oktober 2018.

¹⁰²Ahmad Alamsyah, Waka Humas MAN 1 Palembang, *Wawancara*, 10 Oktober 2018.

Hal-hal tersebut memang benar adanya, untuk saat ini keanggotaan komite madrasah tidak bisa menetap di sekolah dikarenakan hampir seluruh anggota komite memang bekerja di instansi luar sekolah, sehingga sulit untuk ditemukan, harus memang benar-benar menyusun jadwal yang tepat untuk kegiatan komite dan rapat-rapat tertentu.

2. Faktor Pendorong

Selain faktor penghambat komite sekolah juga memiliki faktor pendorong dalam menjalankan perannya. Dalam pelaksanaan peningkatan mutu, sekolah memiliki faktor yang dapat mensukseskan program-program yang telah direncanakan oleh sekolah dengan Komite madrasah. Dengan faktor pendukung ini, sekolah lebih mudah untuk melaksanakan program-program yang terkait dengan upaya peningkatan mutu, karena selain mempermudah pelaksanaannya juga dapat dijadikan motivasi dalam proses berlangsungnya program tersebut.

Berikut inilah hasil wawancara dengan bapak Ahmad Alamsyah selaku waka humas di MAN 1 Palembang, sebagai berikut:¹⁰³

“Faktor pendukung suksesnya Komite madrasah di MAN 1 Palembang dalam melaksanakan amanahnya, antara lain:

- Ada kesamaan visi antara sekolah dan Komite Sekolah.
- Komunikasi dan koordinasi yang baik dan harmonis antara sekolah dengan Komite Sekolah yang sudah terjalin.
- Adanya saling keterbukaan antara Komite Sekolah dengan sekolah, sehingga sekolah tidak merasa diawasi.

¹⁰³ Ahmad Alamsyah, Waka Humas MAN 1 Palembang, *Wawancara*, 10 Oktober 2018.

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Syafi'i selaku waka saran prasarana, evaluasi dan supervisi, sebagai berikut:¹⁰⁴

“faktor pendukung peran komite sekolah diantara lain,

- Kerja sama yang baik yang telah terbina antara unsur-unsur di dalam sekolah dan unsur-unsur dalam masyarakat bersama anggota Komite Sekolah.
- Adanya keterbukaan dari pihak sekolah terhadap peran Komite Sekolah dalam peningkatan mutu atau kualitas pendidikan.
- Terwujudnya kekompakan wali murid dalam melaksanakan hasil kesepakatan dalam mendukung program sekolah.”

Hal serupa yang diungkapkan oleh bapak Habson selaku Kepala Komite sekolah, sebagai berikut:

“Sangat banyak faktor dukungan yang di berikan sekolah mapun keanggotaan komite kami untuk menjalankan peran kami, untuk sekarang salah satunya terjalinnya kerjasama yang baik antara pihak komite, pihak sekolah, dan masyarakat. Terwujudnya kekompakan dalam memutuskan musyawarah dan adanya keterbukaan.”¹⁰⁵

Dari beberapa faktor pendukung yang teridentifikasi diatas, antara sekolah, komite sekolah dan masyarakat berusaha seoptimal mungkin untuk mendukung dan melaksanakan program-program yang terkait dengan upaya peningkatan mutu pendidikan, dengan cara menjalin seilahturami yang baik antara pihak komite, pihak sekolah, dan masyarakat agar dapat menjalankan program-program sekolah yang telah ditetapkan, menciptakan suasana yang kompak dalam memutuskan suatu keputusan yang lain, dan berusaha untuk

¹⁰⁴Syafi'i, Waka Sarana Prasarana, evaluasi dan supervisi MAN 1 Palembang, *Wawancara*, 11 Oktober 2018.

¹⁰⁵Habson, Kepala Komite MAN 1 Palembang, *Wawancara*, 15 Oktober 2018

menciptakan suasana yang transparan tanpa adanya tutup menutupi, untuk sama-sama menciptakan mutu pendidikan yang lebih baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

komite madrasah sangatlah berpengaruh dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang karena komite madrasah memiliki beberapa peranan yang harus dijalankan untuk madrasah itu. Kesimpulan yang dapat di ambil dari peran komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang, adalah:

1. Peran komite madrasah terhadap peningkatan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang, sebagai berikut:
 - a. Memberikan pertimbangan (*advisory agency*), dalam setiap perencanaan dan program yang disusun oleh, misalnya dalam hal perbaikan dan pengadaan sarana prasarana, seperti perbaikan rang kelas, pengadaan alat peraga, pembangunan laboratorium, pembanguan ruang kelas. Selain itu, komite sekolah juga memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS, memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan proses pengelolaan pendidikan di sekolag dan mengidentifikasih sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat untuk dapat diperbantukan bagi pengembangan sekolah

- b. Mendukung (*supporting agency*) penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran.
 - c. Melakukan Kontrol (*controlling agency*) terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, di samping alokasi dana dan sumber daya bagi pelaksanaan program di sekolah komite sekolah juga melakukan fungsi kontrolnya terhadap keberhasilan pendidikan di sekolah yang dilihat dari mutu pendidikan.
 - d. Menjadi Mediator atau penghubung antara aspirasi orang tua masyarakat terhadap pihak sekolah dan turut serta memasyarakatkan kebijakan sekolah kepada pihak-pihak yang terkait dan berwenang di tingkat daerah.
2. Faktor pendukung dan penghambat komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang.

Disetiap lembaga pendidikan suatu organisasi pasti memiliki faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam suatu kegiatan pastilah ada, begitu jugadengan organisasi komite sekolah di MAN 1 Palembang dalam menjalankan perannya. Dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan, sekolah memiliki faktor yang dapat menyukseskan program-program yang telah direncanakan oleh sekolah dengan komite sekolah.

Dengan faktor pendukung ini sekolah lebih mudah untuk melaksanakan program-program yang terkait dengan upaya peningkatan mutu, karena selain mempermudah pelaksanaannya juga dapat dijadikan motivasi dalam proses berlangsungnya program tersebut.

B. Saran

Agar komite madrasah bisa lebih aktif berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang, maka hendaknya komite madrasah lebih meningkatkan hubungan kerjasama, baik dengan guru-guru, orang tua siswa, maupun lembaga-lembaga pendidikan lainnya, agar tercipta sikap saling mendukung dalam tujuan yang sama yaitu meningkatkan mutu pendidikan

DAFTAR PUSTAKA

- B. Uno, Hamza. 2007. *profesi kependidikan*, Jakarta PT, Bumi Aksara
- Danim Sudarwi. 2010. *pengantar pendidikan*, Bandung: Alfabeta
- Depertamen Agama RI. 2003. *Pedoman Komite Sekolah* (Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam)
- Hasbullah. 1999 *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hasbullah. 2007 *Otonomi Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kepmendiknas SK No. 004/U/2002, tentang *acuan pembentukan komite sekolah* Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Maryani Selvi. 2004. Desi Nurhikmahyanti, *Peranan komite sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana di SD Negri Pucang IV Sidoarjo*, Jurnal Inspirasi Menejemen Pendidikan, Vol. 4 no. 4 April
- Misbah, M. 2009. *Peranan dan fungsih komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan*, Insania Vol. 14 no, Jan-Apr
- Mulyasa. 2003 *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyasa. E. 2006. *manajemen berbasis sekolah*, Bandung PT. Remaja Rosada Karya
- Munardji. 2004 *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bina Ilmu
- Nana Syaodih Sukmadinata. Dkk, *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah: Konsep, Prinsip, dan Instrumen*(Bandung: Refika Aditama, 2006),hal. 8
- Nurdin Matry. 2008 *Implementasi Dasar-Dasar Manajemen Sekolah dalam Era Otonomi Daerah*, Makasar: Aksara Madani
- Permendikbut nomor 75 tahun 2017 tentang komite sekolah
- Rahmayulis. 1995. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta Pusat: Kalam Mulia

Redaksi Sinar Grafika. 2008 *UU RI Sisdiknas No 20 Th 2003*, Jakarta: Sinar Grafika,

Rusman. 2009 *Manajemen Kurikulum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

Saidah U.H. 2016. *pengantar pendidikan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Seryosari Punaji. 2013 *metode penelitian pendidikan dan pengembangan*, Jakarta: Kencana

Soejono Soekanto. 1998 *sosiologi suatu pengantar*, Jakarta: Rajawali pers

Sri Renani Pantjastuti. 2008 *Komite Sekolah*, Yogyakarta: Hikayat Publishing

Sugiyono. 2013. *metode penelitian kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Sukirno. 2006. *pedoman kerja komite sekolah* Yogyakarta: Pustaka widyamata

Sulistiyorini. 2006 *Manajemen Pendidikan Islam*, Surabaya: Elkaf

Suparlan Suhartono. 2008 *Wawasan Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Suryabrata Sumadi. 2003. *metodologi penelitian*, Jakarta: raja grafindo persada,

Team Media. 2003 *UU RI No 20 Th 2003 Tentang Sisdiknas*, Surabaya: Media Centre,

Tobroni 2008, *Pendidikan Islam*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang

Umar Tirtoraharja dan S.L Lasulo. 2005 *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Rineka cipta

Undang-undang dan peraturan pemerintah RI, Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Jakarta: dirjen pendidikan islam depag RI, 2006

Wardiah Sri, Murniati, Djailan. *Strategi komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SDN 1 Lhoknga* , Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Vol 3, No.2, Mei 2015, ISSN 2302-0156

Yusuf Muri. 2014. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Jakarta: Premadia Group

